

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENDEKATAN *EXTRAORDINARY*
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
GUNA MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL**

OLEH

**AGUS DWI LAKSANA PUTRA
KOLONEL MARINIR NRP 10416/P**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul "**Pendekatan *Extra Ordinary* Pembinaan Kesadaran Bela Negara Guna Memantapkan Ketahanan Nasional**".

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Gubernur Lemhannas RI Bapak Andi Widjajanto** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI Tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada **Tutor Taskap yaitu Brigadir Jenderal TNI (Purn) Dr. Paula Theresia E.P.U., S.Sos., M.M., Tim Penguji Taskap** dan semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai selesai sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

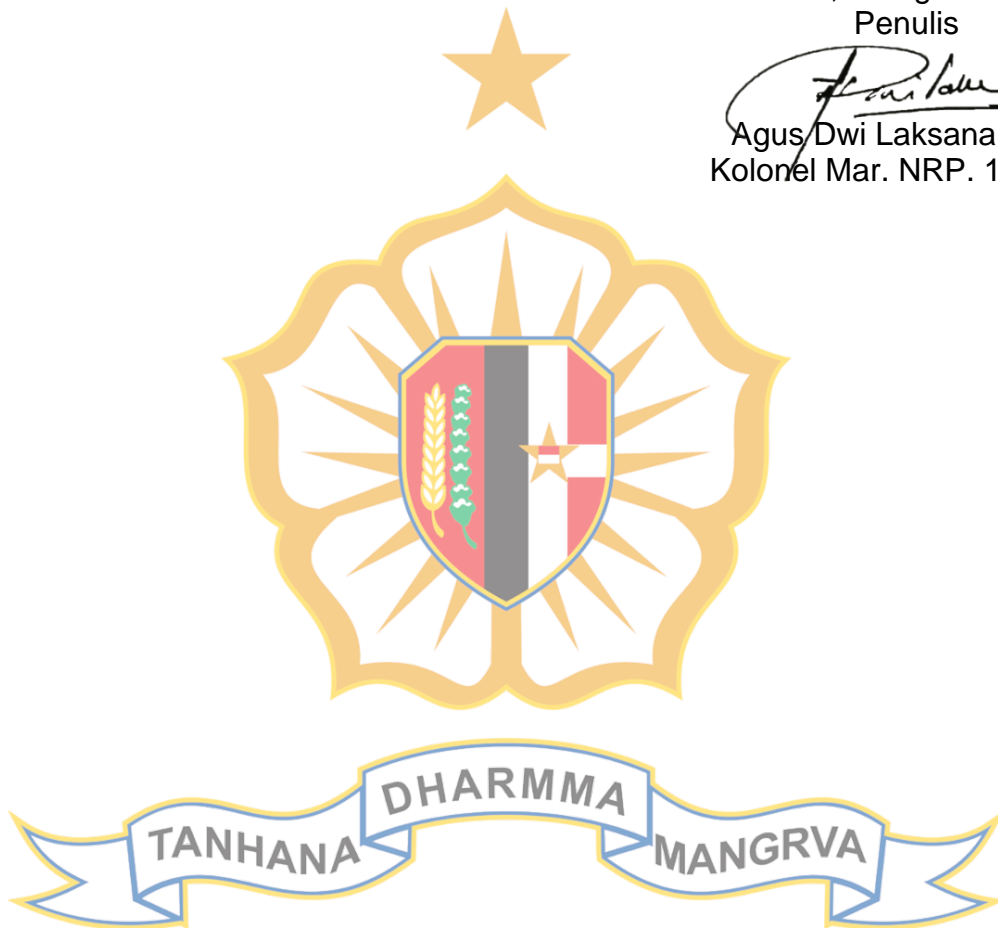
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 10 Agustus 2022

Penulis



Agus Dwi Laksana Putra
Kolonel Mar. NRP. 10416/P



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Dwi Laksana Putra
Pangkat : Kolonel Marinir Nrp 10416/P
Jabatan : Paban II/Jemen Srenum TNI
Instansi : Mabas TNI
Alamat : Jln. Wibawa I E 3 no. 6 Cilandak Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII Tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, 10 Agustus 2022
Penulis

Agus Dwi Laksana Putra
Kolonel Mar. NRP. 10416/P

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP


Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Agus Dwi Laksana Putra.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII
Lemhannas RI Tahun 2022.
Judul Taskap : **“Pendekatan *Extraordinary* Pembinaan Kesadaran
Bela Negara Guna Memantapkan Ketahanan Nasional”**.

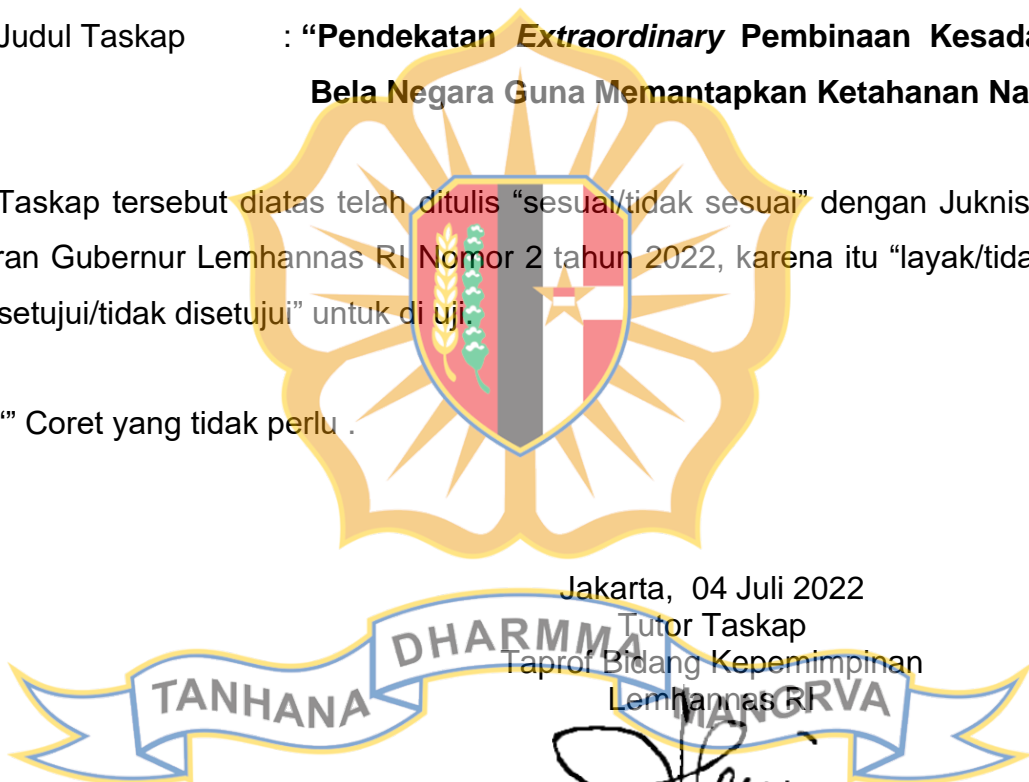
Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 2 tahun 2022, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk di uji.

“” Coret yang tidak perlu .

Jakarta, 04 Juli 2022
Tutor Taskap
Taprof Bidang Kepemimpinan
Lemhannas RI



Dr. Paula Theresia E.P.U., S.Sos., M.M.
Brigadir Jenderal TNI (Purn)



KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN TUTOR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	6
6. Pengertian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.....	9
8. Peraturan dan Perundang-undangan	9
9. Kerangka Teoretis.....	13
10. Data dan Fakta.....	15
11. Lingkungan Strategis	18

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum.....	29
13. Manajemen Pengelolaan PKBN Dalam Lingkup Masyarakat.....	29
14. Metode Penyelenggaraan PKBN Dalam Lingkup Masyarakat.....	32
15. Strategi dan Upaya PKBN Dalam Lingkup Masyarakat.....	39

16. Korelasi PKBN dan Memantapkan Ketahanan Nasional
.....43

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan.....47
17. Rekomendasi.....51

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN:

- I. ALUR PIKIR
- II. DAFTAR GAMBAR
- III. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



**PENDEKATAN EXTRA ORDINARY PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
GUNA MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**



1. **Latar Belakang.**

a. Perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 disertai dengan pengorbanan-pengorbanan, baik perasaan, harta benda hingga jiwa dan raga yang pada akhirnya melahirkan nilai-nilai cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah serta sadar berbangsa dan bernegara sebagai nilai-nilai nasionalisme. Selanjutnya dalam perjalanan mengisi kemerdekaannya, bangsa Indonesia juga masih diuji dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang menggoyahkan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Serangkaian perjuangan dalam mengatasi peristiwa-peristiwa tersebut juga telah melahirkan nilai nasionalisme untuk tetap setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai nasionalisme tersebut pada hakikatnya merupakan nilai-nilai dasar bela negara dan sangat penting dalam kehidupan bernegara sebagai *spirit* dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Nilai-nilai dasar bela negara perlu ditanamkan pada setiap sanubari masyarakat hingga mampu menumbuhkan kesadarannya untuk aktif terlibat dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai cita-cita nasional. Cita-cita yang akan diwujudkan melalui realisasi kehendak seluruh rakyat Indonesia yang menjadi Kepentingan Nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam realisasinya menjadi tanggung

jawab dan kewajiban negara untuk memenuhi, menjaga dan melindungi hak untuk hidup serta kelangsungan kehidupan warga negaranya dengan seluruh daya upaya yang dimiliki, melalui keikutsertaan dalam usaha-usaha bela negara yang merupakan hak dan kewajiban warga negara akan kesediaannya, kesadarannya dan dharma baktinya dengan rela berkorban kepada bangsa dan negara.

b. Ditengah globalisasi sebagai fenomena peradapan manusia yang terus bergerak dalam masyarakat global, telah memberikan dampak pada aspek-aspek kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan merupakan dua sisi yang saling bertolak belakang dan merupakan realita yang telah terjadi baik dampak positif seperti meningkatnya etos kerja hingga arus ekonomi yang meningkat, namun satu sisi juga telah menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kesenjangan sosial dan lahirnya pola hidup konsumtif sebagai hal yang merugikan. Fenomena peradapan tersebut, saat ini disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu menjadi alat penggerak globalisasi telah dijadikan sarana untuk mencapai sebuah tujuan atau kepentingan dari sebuah negara. Bila sebelumnya, serangan secara fisik dilakukan dalam bentuk agresi kepada negara lain, saat ini serangan dilakukan terhadap pertahanan sebuah negara semakin kompleks dan cenderung bersifat nonfisik. Bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu melahirkan kemampuan peretas atau *hacker* yang mampu mempengaruhi sebuah sistem pertahanan suatu negara dengan melaksanakan serangan-serangan terhadap semua aspek kehidupan idiologi, politik ekonomi dan sosial budaya. Kemajuan teknologi dengan menghadirkan *smartphone* sebagai sarana yang bersifat mobile dan saling terhubung dengan kehidupan masyarakat, pada realitanya hampir setiap hari menjadi perantara penyampaian atau penyebaran berbagai informasi *hoaks*, *fake News* dan *hate Speech* yang dapat mempengaruhi, melunturkan hingga menggerus nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dapat dilihat dan dirasakan dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang tanpa disadari telah hadir perilaku-perilaku radikalisme, tindakan terorisme, sikap pertentangan antar kelompok masyarakat, konflik antar suku, perkelahian antar mahasiswa dan pelajar, merosotnya sikap

kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bergeser menjadi sikap individualisme serta adanya tindakan sparatis bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Perilaku-perilaku tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang apabila berkembang dan tumbuh subur dapat menjadi ancaman yang akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional sekaligus menjadi penghambat pembangunan nasional.

c. Kondisi realita sebagaimana diuraikan diatas, pada akhirnya menjadi pendorong perlunya usaha-usaha bela negara dalam bentuk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi warga negara guna meningkatkan daya tangkal (*deterrent*) dan memperkuat pertahanan negara menghadapi segala bentuk ancaman. Bahwa kegiatan PKBN telah diselenggarakan oleh Pemerintah mengacu pada Pedoman PKBN yang telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui program-program kegiatan dengan tahapan sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi yang dilanjutkan dengan tahap internalisasi hingga tahap aksi gerakan nasional. Namun capaian yang dihasilkan belum mampu membangun minat dan kesadaran warga negara yang memiliki nilai-nilai dasar bela negara. Capaian tersebut tidak terlepas dari manajemen pengelolaan PKBN terkait sistem penyelenggaraannya yang belum terpadu, belum sinergis dan belum komprehensif serta penerapan metode yang belum mampu menumbuhkan minat dan kesadaran bela negara. Mengingat pentingnya nilai-nilai dasar bela negara dalam proses pembangunan nasional maka perlu adanya upaya yang dilakukan melalui pendekatan *extraordinary*, sebuah pendekatan terhadap suatu rencana atau agenda kegiatan yang bersifat luar biasa, yang dalam implementasinya memuat unsur-unsur spektakuler dan luas diluar kebiasaan yang dilaksanakan. Pendekatan *extraordinary* ditujukan untuk mampu membangun kesan positif publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu hal berdasarkan sejarah, nilai-nilai yang terkandung dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya penyelenggaraan PKBN dilaksanakan secara massif dan berkelanjutan dengan *grand desigh* atau *roadmap* yang mampu dijadikan pedoman dalam membangun kesan positif publik hingga terbentuknya kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara. PKBN merupakan satu keharusan

yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagaimana amanah konstitusi negara Indonesia dalam upaya setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Judul Kertas Karya Ilmiah Perorangan **“Pendekatan *Extraordinary* Pembinaan Kesadaran Bela Negara Guna Memantapkan Ketahanan Nasional”** ini dilatar belakangi bahwa penyelenggaraan PKBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah berjalan normatif dengan realita kondisi kesadaran bela negara masyarakat Indonesia masih banyak diwarnai dengan perilaku-perilaku yang belum mengarah pada tercapainya kemantapan Ketahanan Nasional.

2. **Rumusan Masalah.** Sesuai dengan uraian latar belakang yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, maka rumusan masalah Taskap ini adalah “Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara belum mengarah pada tercapainya kemantapan Ketahanan Nasional”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis telah melaksanakan penelaahan dan analisis singkat dalam menyusun pertanyaan kajian, selanjutnya pertanyaan kajian tersebut akan menjadi bahasan untuk dianalisis lebih mendalam dalam tulisan ini. Adapun pertanyaan kajian dalam Taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah manajemen pengelolaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara terlaksana secara terpadu, sinergis dan komprehensif sehingga mampu menumbuhkan sikap bela negara?
- b. Apakah metode Pembinaan Kesadaran Bela Negara mampu membangun minat dan kesadaran bela negara dalam lingkup masyarakat?
- c. Bagaimana Strategi dan Upaya Pembinaan Kesadaran Bela Negara agar dapat memantapkan Ketahanan Nasional?

3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara serta pemecahannya.

b. **Tujuan.** Penulisan Taskap ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan terkait solusi permasalahan Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara guna memantapkan Ketahanan Nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang Lingkup.** Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dilakukan terhadap setiap murid di sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi, Masyarakat dan instansi/organisasi maupun institusi sebagai rangkaian penyelenggaraan program yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai dasar bela negara. Ruang lingkup penyusunan Taskap ini dibatasi pada pelaksanaan PKBN dalam lingkup masyarakat. Dengan permasalahan penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang belum mengarah pada tercapainya kemantapan Ketahanan Nasional yang akan dibahas dengan berpedoman pada Perundang-Undangan, landasan teori, data dan fakta serta mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis.

b. **Sistematika.** Pembahasan dalam tulisan ini meliputi 4 (empat) Bab yang terdiri dari:

1) Bab I Pendahuluan. Diuraikan secara umum tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan serta Pengertian.

2) Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela

Negara, Peraturan Perundang-Undangan, Kerangka Teoritis, Data dan Fakta, serta Pengaruh Lingkungan Strategis dalam melaksanakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

3) Bab III Pembahasan. Bab ini akan membahas gambaran umum mengenai Pendekatan *Extraordinary* terhadap Pembinaan Kesadaran Bela Negara terkait manajemen pengelolaan PKBN yang belum terpadu, belum sinergis dan belum komprehensif antar penyelenggaranya sebagai sebuah sistem penyelenggaraan, serta metode dan materi yang diterapkan termasuk Strategi dan Upaya yang ditetapkan belum mampu menumbuhkan minat dan kesadaran bela negara dalam lingkup masyarakat. Pada akhir pembahasan Bab ini juga dibahas tentang korelasi PKBN dalam lingkup masyarakat dengan kemantapan Ketahanan Nasional. Pada bahasan permasalahan-permasalahan tersebut akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori yang relevan, data dan fakta serta mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis.

4) Bab IV Penutup. Merupakan simpulan yang akan menguraikan rumusan secara sistematis sesuai pokok bahasan dan diakhiri dengan solusi dari setiap pokok bahasan serta rekomendasi yang merupakan pernyataan singkat dan tepat sebagai saran tindak lanjut kepada pemangku kepentingan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan diterapkan pada Pembinaan Kesadaran Bela Negara guna memantapkan Ketahanan Nasional.

5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Metode penulisan Taskap yang digunakan adalah menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif. Pada pengumpulan data dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer (bila memungkinkan).

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan Taskap ini adalah menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis.

6. Pengertian.

a. **Extraordinary** menurut kamus Bahasa Indonesia, *extraordinary* merupakan kata sifat yang memiliki arti “luar biasa” dan memiliki kesamaan dengan *amazing*, *anomalous*, *remarkable* dan *super*. *Extraordinary* bisa diartikan yaitu kegiatan di luar kebiasaan, kegiatan yang luar biasa atau kegiatan yang bukan seperti biasanya, tidak seperti kebanyakan namun unik, bermanfaat dan monumental bahkan spektakuler¹.

b. **Bela Negara** adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan Warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman².

c. **Ketahanan Nasional Indonesia** adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya³.

d. **Pembinaan Kesadaran Bela Negara** yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam

¹ <http://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/extraordinary>, diunduh tanggal 10 April 2022 pukul 15.22 WIB.

² Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

³ Lemhannas RI. Tahun 2022. *Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta:

rangka memberikan pengetahuan, pendidikan dan/atau pelatihan kepada Warga Negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara⁴.

e. **Nilai Dasar Bela Negara** meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan kemampuan awal bela negara⁵.



⁴ Ibid. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.

⁵ Op.cit.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. **Umum.** PKBN dalam lingkup masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah belum mampu meningkatkan minat dan kesadaran bela negara, dari analisis penyelenggaraannya dapat disimpulkan perlunya dilakukan upaya-upaya melalui pendekatan *extraordinary*. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan PKBN menjadi tantangan tersendiri untuk di atasi, mengingat pentingnya nilai-nilai dasar bela negara guna memantapkan Ketahanan Nasional dalam menopang Pembangunan Nasional. Pendekatan *extraordinary* dilakukan dengan berbagai pengembangan dengan mempertimbangkan instrumental input, dengan tinjauan Perundang-Undangan untuk mendapatkan dasar pijakan hukum dan legalitas, landasan teoritis untuk mendapatkan pembenaran akademis dan ilmiah, data dan fakta untuk mendukung analisis serta perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan PKBN.

8. **Peraturan Perundang-Undangan.** Bahwa keterlibatan pemerintah dan masyarakat harus dapat berjalan searah dan beriringan dalam mekanisme dan prosedur yang mengatur peran dan keterlibatan semua *stakeholders* terkait. Untuk itu dalam penyelenggaraan PKBN diperlukan landasan operasional sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. **Undang-Undang Dasar NRI 1945.** Undang-Undang NRI 1945 (amandemen ke dua) BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, pada Pasal 30 (1) menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; dan ayat (2) yang menyatakan Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan negaranya Indonesia yaitu:

- 1) Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- 2) Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.

Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatannya.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Usaha-usaha bela negara bagi warga negara juga terwadahi dalam ketentuan Pertahanan negara yang menyatakan:

- 1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- 2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui: a. **pendidikan kewarganegaraan**; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi.
- 3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Usaha bela negara, yang merupakan hak dan kewajiban dasar juga sebuah kehormatan bagi warga negara melalui kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban kepada bangsa dan negara. Pada hakikatnya upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara telah diwadahi dalam regulasi

negara sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraannya.

c. **Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertahanan.**

Kementerian Pertahanan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan yang memiliki fungsi-fungsi Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Strategi Pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan". Bahwa fungsi terkait potensi pertahanan selanjutnya didelegasikan melalui tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang potensi pertahanan yang meliputi sumber daya pertahanan dan sumber daya manusia pendukung pertahanan yang diembankan kepada Direktur Jenderal Potensi Pertahanan.

d. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.**

1) Bahwa usaha-usaha dalam bela negara telah ditetapkan pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa: (1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dilaksanakan melalui usaha: a. **Bela Negara**; b. penataan Komponen Pendukung; c. pembentukan Komponen Cadangan; d. penguatan Komponen Utama; dan e. Mobilisasi dan Demobilisasi.

2) Pada Pasal 6 dinyatakan bahwa: (1) Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara, (2) Keikutsertaan Warga Negara dalam usaha bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui: a. **pendidikan kewarganegaraan**; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi.

3) Selanjutnya pada Pasal 7 ditegaskan bahwa: (1) Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui **Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara**; (2) Pembinaan

Kesadaran bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkup: a. pendidikan; b. **masyarakat**; dan c. pekerjaan.

4) Pada akhirnya Pembinaan Kesadaran Bela Negara terkait **lingkup masyarakat** ditegaskan pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa “Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditujukan bagi Warga Negara yang meliputi”: a. **tokoh agama**; b. **tokoh masyarakat**; c. **tokoh adat**; d. **kader organisasi masyarakat**; e. **kader organisasi komunitas**; f. **kader organisasi profesi**; g. **kader partai politik**; dan h. **kelompok masyarakat lainnya**.

e. **Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan.**

Bahwa penyelenggaraan PKBN dalam lingkup masyarakat terdapat keterlibatan dan peran *stakeholders* terkait yang diuraikan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

1) Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat dilaksanakan oleh Menteri menyelenggarakan urusan Pertahanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

2) Dalam penyelenggaraan PKBN Menteri menyelenggarakan urusan Pertahanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dapat bekerja sama dengan kepala daerah dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat dilaksanakan melalui penyusunan pedoman PKBN, sosialisasi dan diseminasi, Diklat serta pemantauan dan evaluasi.

9. **Kerangka Teoritis.** Dalam pembahasan pendekatan *extraordinary* Pembinaan Kesadaran Bela Negara guna Memantapkan Ketahanan Nasional digunakan beberapa landasan teori sebagai berikut: Substansi pembahasan taskap dapat dirinci sebagai berikut:

- a. **Teori Bela Negara Chaidir Basrie.** Bela negara merupakan sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan dan kesaktian Pancasila, sebagai ideologi negara. Bahwa bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari bela negara yaitu suatu tekad atau niat yang dilanjutkan dengan sikap yang teratur, berkesinambungan dan terus menerus yang dilandasi dengan rasa cinta tanah air dan kesadaran dari warga negara itu sendiri terhadap negaranya yang diyakini dan dipercaya bahwa dasar negara adalah undang-undang yang merupakan konstitusi dalam negara⁶.
- b. **Teori Perilaku Kurt Lewin (1980).** Kurt Lewin menyatakan bahwa Perilaku manusia dapat berubah sesuai harapan, apabila ada faktor pendorong yang spektakuler dan berkesan⁷.
- c. **Teori Rekayasa Sosial.** Rekayasa sosial merupakan campuran atau seni memanipulasi sebuah gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial⁸. Perubahan yang dapat dilakukan melalui:
 - 1) Strategi *Normative-Reeducative* (normatif-reedukatif). Perubahan yang dilakukan secara perlahan dan bertahap melalui cara atau taktik yang digunakan adalah mendidik, yakni bukan saja

⁶ <http://adechotimatanjung.blogspot.com/2013/05/motivasi-bela-negara-berdasarkan.html>, diunduh pada 06 Feb 2022 pukul 15.18 wib.

⁷ Ibid,

⁸ Jalaluddin Rakhmat. Tahun 1999. *Rekayasa Sosial Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

mengubah perilaku yang tampak melainkan juga mengubah keyakinan dan nilai sasaran perubahan.

2) Strategi *Persuasive Strategy* (strategi persuasif). Perubahan yang dilakukan melalui pembentukan opini dan pandangan masyarakat, biasanya menggunakan media massa dan propaganda.

d. **Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers.** Everett M. Rogers yang menyatakan bahwa difusi Inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Rogers mendefinisikan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru dan lebih jauh dijelaskan difusi adalah penyebaran yang merupakan ide baru dari sumber penemuan atau kreasinya kepada pengguna atau pengadopsi utamanya⁹. Menurut teori ini sesuatu yang baru akan menimbulkan keinginan tawaran masyarakat untuk mengetahuinya, seseorang yang menemukan hal baru cenderung untuk mensosialisasikan dan menyebarkannya kepada orang lain dan penemu ingin menyebarkan sementara orang lain ingin mengetahuinya. Teori difusi inovasi merupakan salah satu yang dipedomani terkait komunikasi masa, dimana dalam komunikasi masa dapat dilakukan dengan atau tanpa alat/media massa, tujuannya adalah penyebarluasan informasi yang perlu diketahui oleh suatu massa tanpa adanya proses dialog, arus informasi bersifat satu arah.

e. **Teori Ketahanan Nasional Soewarso Harjosoedarmo.** Ketahanan nasional adalah kondisi totalitas aspek-aspek kehidupan bangsa berdasarkan wawasan nasionalnya guna mewujudkan daya kebal, daya tangkal dan daya gempur untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa tersebut sesuai dengan tujuan yang digariskan¹⁰.

⁹Elvinaro Ardianto, dkk. Tahun 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

¹⁰Wiryadi. Tahun 2008. *Peran Nuklir Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Kajian Strategik Ketahanan Nasional.

10. **Data dan Fakta.** Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai satu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, hakekatnya untuk dapat dijadikan payung hukum dalam penyelenggaraannya. Perundang-undangan sebagai regulasi dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan dan Keputusan Menteri ditetapkan untuk dapat dipedomani agar tidak terjadi adanya kondisi yang mengalami hambatan dan kendala yang berarti dalam pelaksanaannya, sekaligus dapat dijadikan acuan penetapan kebijakan pada tingkat Pemerintah Daerah. Bahwa realitanya, capaian penyelenggaraannya belum terlaksana dengan optimal dengan kondisi berjalannya program secara normatif sebagaimana beberapa data dan fakta yang tergambar sebagai berikut:

- a. Direktorat PKBN Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kemhan menggelar kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri pejabat perwakilan dari sejumlah Kementerian/Lembaga terkait pada 5 Mei 2015 di Jakarta¹¹. FGD diselenggarakan untuk membahas Naskah Akademik *Grand Design* PKBN yang merupakan draft awal untuk didiskusikan agar diperoleh hasil yang lebih baik, artinya nantinya akan menjadi pedoman yang dapat diterapkan, dan selanjutnya akan dijadikan acuan secara nasional dalam penyelenggaraan PKBN pada kementerian/lembaga. Diharapkan diskusi dilakukan untuk menyamakan visi, misi dan persepsi seluruh komponen bangsa dalam rangka PKBN dengan tujuan menyamakan langkah dalam mengimplementasikan Bela Negara khususnya dalam upaya memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.
- b. Kemhan dalam upaya melibatkan seluruh komponen masyarakat pada pelaksanaan PKBN pada Jumat 12 Februari 2016 di Jakarta melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan 20 (dua puluh) organisasi kemasyarakatan¹². Bahwa Kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara perlu

¹¹ <https://www.kemhan.go.id/2015/05/08/kemhan-susun-grand-design-pembinaan-kesadaran-bela-negara.html>, diunduh pada 30 Maret 2022 pukul 15.40 WIB.

¹² <https://www.kemhan.go.id/2016/02/12/kemhan-tandatangani-kesepakatan-bersama-dengan-20-ormas-dalam-pembinaan-kesadaran-bela-negara.html>, diunduh pada 1 April 2022 pukul 20.00 WIB.

ditumbuhkembangkan melalui proses pembinaan kesadaran bela negara. Hakekat bela negara menurut Undang-Undang adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara untuk membentuk kekuatan pertahanan negara dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Sedangkan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dimaksudkan untuk membangun karakter bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme serta ketahanan nasional yang tangguh demi menghadapi ancaman nyata dan tidak nyata yang mengancam kedaulatan bangsa. Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang merupakan upaya membangun karakter Bangsa Indonesia, yang dalam pelaksanaannya diperlukan upaya yang terpadu dan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta segenap komponen bangsa yang lainnya termasuk peran serta organisasi kemasyarakatan serta para tokoh adat dan tokoh agama.

c. Kemhan menyelenggarakan acara PKBN pada jum'at 1 Maret 2019 di Gedung Pusdiknas Kwarnas Pramuka Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur¹³ kepada 108 peserta Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila. Acara diperuntukan bagi Pemuda Pancasila yang berasal dari 21 Provinsi, dengan harapan dapat memperkuat kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Pemuda Pancasila sebagai penerus bangsa diharapkan dapat menjadi generasi yang lebih baik dengan memiliki landasan agama dan jiwa kenegarawanan yang kuat. Melalui kegiatan Kesadaran Bela Negara diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran maupun konsep mendasar untuk meningkatkan kiprah organisasi dalam memberikan kontribusi yang positif terhadap bangsa dan negara.

d. Kemhan menyelenggarakan acara Rembug Nasional Bela Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan pada 24 - 25 Maret 2021, di Jakarta yang diikuti oleh 208 peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah Daerah terkait, TNI dan Polri. Rembug Nasional TA 2021 dengan tema "Rembug Nasional Menyatukan Persepsi dan Optimalisasi Program Nasional Bela Negara

¹³<https://www.kemhan.go.id/2019/03/01/menhan-membuka-acara-pembinaan-kesadaran-bela-negara-bagi-pemuda-pancasila.html>, diunduh pada 1 Maret 2022 pukul 22.22 WIB.

Dalam Rangka Membangun Sinergi dan Sinkronisasi Program Kebijakan PKBN Secara Masif dan Berkesinambungan”¹⁴. Bahwa tugas bela negara bukan hanya tugas TNI dan Kementerian Pertahanan saja, namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban semua pihak sebagai warga negara Indonesia dengan cara menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai peran dan profesinya.

e. Kemhan menyelenggarakan Diklat terhadap 160 Kader Bela Negara bagi Dosen UPN Veteran Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur pada 22 November 2021, di Pusdiklat Bela Negara, Rumpin, Bogor¹⁵. Diklat Kader Bela Negara TA 2021 mengambil tema “Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara bagi Dosen UPN Veteran TA 2021 Mewujudkan Kader Bela Negara yang Memiliki Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme yang Tinggi. Bahwa hakekat PKBN adalah upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta ketahanan nasional demi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tangguh. PKBN diarahkan untuk menangkal paham, ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian Bangsa Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi.

f. Pemprov. Riau menyelenggarakan PKBN melalui pembekalan wawasan kebangsaan bagi organisasi Laskar Melayu pada Sabtu, 18 Desember 2021 di Balai Marifat Mardjani Pekanbaru¹⁶. Hadir Gubernur Riau yang sekaligus menjadi *keynote speaker* dengan tema “Revitalisasi wawasan kebangsaan dan Bela Negara organisasi laskar-laskar Melayu Riau dalam mendukung visi misi Riau Bersatu”. Kegiatan bela negara ini, merupakan upaya nyata untuk mengajak seluruh organisasi Laskar Melayu di Prov. Riau menyatukan wawasan dan gagasan guna kemajuan bangsa dan terwujudnya kesadaran bela negara sesuai visi Pemprov Riau

¹⁴<https://www.kemhan.go.id/2021/06/17/pembinaan-bela-negara-penting-untuk-bangun-daya-tangkal-bangsa.html>, diunduh pada 28 Maret 2022 pukul 19.36 WIB.

¹⁵<https://www.kemhan.go.id/2021/11/22/diklat-kader-bela-negara-diharapkan-dapat-menumbuhkembangkan-kesadaran-berbangsa-dan-bernegara.html>, diunduh pada 2 Maret 2022 pukul 21.20 WIB.

¹⁶<https://infopublik.id/kategori/nusantara/591030/buka-pembekalan-kebangsaan-gubri-ajak-satukan-gagasan-untuk-kemajuan-bangsa>, diunduh pada 28 Maret 2022 pukul 16.30 WIB.

mewujudkan Riau berdaya saing sejahtera bermartabat unggul di Indonesia atau Riau Bersatu.

g. Pemprov. Riau melalui BPSDM menyelenggarakan talkshow Wawasan Kebangsaan pada 7 Maret 2022 dengan narasumber Kepala BPSDM Provinsi Riau, Drs. Asrizal, M.Pd.¹⁷ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Riau terbentuk bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya melalui Perda Prov. Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

h. Badiklat Kemhan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepada 40 orang Pembina Tk. Pertama bagi PNS Kemhan, pada Senin 17 Januari TA 2022 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bela Negara Badiklat Kemhan, Rumpin, Bogor, Jawa Barat¹⁸. Melalui penyelenggaraan Diklat Kader Bela Negara ini diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selama Diklat, peserta akan dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku Kader Bela Negara yang nasionalis dan patriotis. Pembinaan kesadaran bela negara diarahkan untuk menangkal paham-paham, ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian Bangsa Indonesia. Bela Negara dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi.

11. **Lingkungan Strategis.** Perkembangan lingkungan strategis selalu membawa pengaruh dan dampak berupa hal yang positif maupun hal yang negatif pada sisi lain secara bersamaan dan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi global, regional dan nasional. Pengaruh hal yang positif berdampak memberikan manfaat dalam mewujudkan cita-cita, menjamin dan melindungi Kepentingan Nasional sedangkan pengaruh hal yang negatif

¹⁷<https://bpsdm.riau.go.id/bpsdm/talkshow-wawasan-kebangsaan-di-provinsi-riau-tahun-2022/>, diunduh pada 2 Maret 2022 pukul 22.12 WIB.

¹⁸<https://www.kemhan.go.id/2022/01/17/kabadiklat-kemhan-hakekat-pembinaan-kesadaran-bela-negara-adalah-untuk-bangun-karakter-bangsa.html>, diunduh pada 2 Maret 2022 pukul 22.12 WIB.

menyebabkan adanya potensi ancaman bagi kelangsungan hidup suatu negara. Globalisasi yang diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengarahkan lingkungan strategis dengan kecenderungan semakin sulit untuk diprediksi, dimana ketidakteraturan dan ketidakstabilan semakin menjadi corak yang dominan sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah negara. Mencermati kondisi tersebut, perlu adanya kewaspadaan terhadap setiap potensi ancaman serta lebih bersungguh-sungguh meningkatkan Ketahanan Nasional pada semua aspek dengan melakukan upaya-upaya adaptasi guna mempertahankan Kepentingan Nasionalnya.

a. **Lingkungan Global.**

1) Globalisasi merupakan sebuah fenomena dalam kehidupan manusia, dimana telah terjadi adanya proses penyusutan dunia yang menimbulkan jarak semakin pendek dan segala hal terasa semakin dekat serta semakin mudahnya interaksi antara seseorang di satu tempat dengan orang lain di belahan dunia yang lain. Globalisasi dapat diartikan sebagai peningkatan hubungan sosial dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang jauh sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain hingga memunculkan proses tatanan masyarakat yang mendunia dengan tidak lagi mengenal batas wilayah negara. Dinamika globalisasi dalam perkembangannya telah diiringi kemajuan teknologi dan komunikasi yang pada realitanya mampu mengkaburkan batas-batas wilayah negara, setiap orang bisa mendapatkan informasi di luar batas negaranya dan menyebabkan batas wilayah antar negara menjadi hal yang tidak penting lagi.

2) Dihadapkan pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang serba digital, menyebabkan alur informasi dari seluruh penjuru dunia tidak dapat dikontrol, pertukaran ide, gagasan melalui teknologi informasi sangat massif, dunia tanpa batas menjadi suatu keniscayaan dan batas batas antar negara di dunia maya menjadi tidak masuk dalam logika normal. Suatu kondisi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perilaku dan pola tindak masyarakat, dan saat ini melihat kehidupan

masyarakat modern dengan ciri media sosial telah menjadi kebutuhan dimana melalui media sosial seseorang dapat mengetahui berbagai ilmu dan perkembangan informasi yang sedang terjadi. Sisi negatif dari masifnya penggunaan media sosial adalah sering kali digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, oleh karena itu penggunaan media sosial harus benar-benar diperhatikan. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akibat kemajuan teknologi pada masa digitalisasi telah mengalir arus informasi ideologi transnasionalisme sebagai fenomena sosial yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dengan batasan-batasan sosial antar negara semakin kabur. Pada akhirnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu membawa hubungan keseluruhan dunia tidak serta merta mampu meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan, tetapi kenyataannya justru memperlebar jurang perbedaan.

3) Derasnya arus informasi telah membalut suatu negara saling terhubung, tanpa batas dan saling tergantung. Informasi yang masuk membawa nilai-nilai baru yang belum tentu akan sesuai dengan kepribadian dan karakter dari masyarakat Indonesia sehingga akan bergeser dan bahkan mungkin di anggap telah usang. Pada tataran mikro dari pola keseharian masyarakat Indonesia telah diwarnai pola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang bersifat individualistik, sedangkan pada tataran makro dapat dilihat dan dirasakan akan kurang tanggunya Ketahanan Nasional Indonesia.

b. **Lingkungan Regional.**

1) China merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Pasifik, yang pada perkembangannya telah menunjukkan peningkatan kekuatan ekonomi dan militernya telah menjadikan satu fenomena kekuatan sebagai adidaya baru yang menghadirkan rivalitas kekuatan sehingga menyebabkan gejolak geo-politik kawasan. Pengaruh China telah dirasakan saat menetapkan kebijakan-kebijakan seperti: sengketa kedaulatan (*Claimant State*) dengan negara-negara

Kawasan di wilayah Laut China Selatan (LCS), kebebasan melakukan pelayaran internasional *Freedom Of Navigation* yang dikaitkan dengan klaim sepihak *The Nine-Dash Lines*, strategi kerjasama ekonomi melalui konsep *One Belt One Road* (OBOR) atau *Belt and Road Initiative* (BRI) serta kebijakan *One China Policy* terhadap Taiwan dan *Balance Of Power* (BoP) China-Korea Utara terhadap kerja sama Amerika-Korsel. Satu sisi Amerika dalam rangka perimbangan hegemoni China dikawasan LCS menyelenggarakan forum koordinasi dengan negara Australia dan United Kingdom yang disebut *AUKUS* sebagai forum koordinasi keamanan trilateral bagi kawasan Indo-Pasifik untuk menghadapi ancaman abad ke-21. Aliansi ini memungkinkan pembagian kemampuan pertahanan yang lebih besar membantu Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dan bersama mempromosikan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik serta mendukung nilai dan kepentingan bersama dengan membantu negara-negara lain untuk percaya pada Amerika dan komitmennya terhadap negara-negara dalam konteks geo-politik. *AUKUS* akan mempertahankan dan memperluas keunggulan kemampuan militer dengan membangun kapal selam bertenaga nuklir, kemampuan dunia maya (*cyber capabilities*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi kuantum (*quantum technologies*) dan domain bawah laut untuk meningkatkan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik sebagai upaya yang diarahkan untuk memastikan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik guna menghadapi kebangkitan China yang dipandang dapat meningkatkan ancaman dan mengembangkan teknologi yang lebih luas.

2) Memprediksi kemungkinan apabila rivalitas berkembang menjadi sebuah konflik bahkan terjadinya perang di wilayah Laut China Selatan, dengan mengingat wilayah Indonesia sangat berdekatan maka potensi mengalami dampak langsung seperti: potensi kerusakan dan kehancuran wilayah Natuna akibat salah sasaran, eksploitasi dan eksplorasi yang sedang dilakukan di Natuna dan perairan Natuna terhenti sehingga bukan tidak mungkin

Indonesia yang sebelumnya tidak ikut terjun dalam peperangan terbuka malah ikut bertempur karena kedaulatan negara terganggu. Mencermati dinamika regional yang terus berkembang merupakan sebuah ancaman potensial yang perlu diwaspadai dan menjadi momentum dalam rangka usaha-usaha bela negara. Bahwa keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasinya. Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap bela negara akan membuat negara memiliki ketahanan nasional yang kuat. Dengan demikian, kesadaran tersebut akan muncul setelah seseorang memiliki pemahaman terhadap sesuatu sebagaimana telah terjadi pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia akan masa lalu dalam berbagai momentum-momentum besar guna memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri yang ingin bebas dari penjajahan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa konsep pertahanan negara saat masa damai maupun masa perang didasarkan pada refleksi spektrum bela negara yang harus dipahami oleh semua warga negara. Melalui hal tersebut sesungguhnya diingatkan, bahwa setiap warga negara Indonesia maupun bangsa lainnya untuk senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan ruang hidup serta kepentingan nasionalnya. Pada dasarnya Ketahanan Nasional harus dibina dan dikondisikan dari berbagai aspek akan menentukan kualitas dari pertahanan negara itu sendiri, sehingga pertahanan negara sangat berbanding lurus dengan Ketahanan Nasional. Dengan demikian setiap transformasi maupun pergeseran yang terjadi pada Ketahanan Nasional akan berpengaruh juga pada pertahanan negara sampai pada implementasinya.

3) Saat ini klasifikasi bela negara ini tidak pada pemahaman bahwa bela negara harus angkat senjata atau secara fisik, melainkan saat ini bela negara kontekstualisasinya jauh lebih luas bahkan paling lunak yang tercermin dalam jiwa, karakter, sikap, bahkan jati diri dari setiap warga negara yang pada prinsipnya akan dituangkan ke dalam

pola melalui pikiran, karakter, maupun sikap akan mencerminkan kesadaran dalam bela negara dalam perwujudan tindakan nyata diberbagai keseharian yang menjunjung tinggi negara Indonesia. Sedangkan pada konteks keras merupakan bentuk hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan secara fisik untuk menghadapi ancaman militer negara lain. Klasifikasi bela negara dari yang lunak sampai keras tidak boleh terputus dan harus berkelanjutan, bahkan sangat sulit dipungkiri saat ini memberikan pemahaman dan meningkatkan peran bela negara lebih kompleks maupun komprehensif pada saat masa damai menjadi kunci keberhasilan dari terselenggaranya peran bela negara agar dapat menentukan kualitas dari pertahanan negara Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, negara telah menyusun sistem pertahanan semesta yang mekanismenya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan peran, tugas, dan tanggung jawab Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen pendukung. Pemahaman yang sangat komprehensif terhadap Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung jika terselenggara dengan baik maka akan memperkuat dan memperbesar dari Komponen Utama.

c. **Lingkungan Nasional.** Pengaruh lingkungan nasional dapat ditinjau dari aspek *Astragatra* yang terdiri dari tiga gatra bersifat statis dan lima gatra bersifat dinamis. Potensi *Astragatra* dapat berpengaruh positif dalam usaha-usaha Pembinaan Kesadaran Bela Negara, namun pada sisi yang berbeda apabila salah dalam mengelolanya akan dapat menimbulkan pengaruh negatif. Identifikasi aspek *Astragatra* tersebut adalah sebagai berikut:

1) Gatra Geografi. Negara Republik Indonesia berbentuk kepulauan dan terdiri atas ± 17.508 buah pulau dengan luas seluruh wilayah kedaulatan $\pm 7,8$ juta km^2 dan $\pm 2,03$ juta km^2 wilayah daratan dengan memperhitungkan ZEE maka luas wilayah daratan dan

wilayah lautan adalah satu berbanding empat (1: 4).¹⁹ Posisi geografis yang sangat strategis berada pada posisi silang pelayaran dunia memberikan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam persoalan global yang memiliki dampak positif dan negatif. Khususnya dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi posisi strategis yang dimiliki, memerlukan upaya-upaya penangkalan dalam bentuk kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya dalam usaha-usaha bela negara.

2) Gatra Kekayaan Alam. Hakekatnya Sumber Kekayaan Alam merupakan sumber daya yang sangat diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, karena memiliki fungsi sebagai modal pembangunan ekonomi dan penyangga kehidupan. Dengan demikian eksploitasi sumber kekayaan alam wajib berbasis ekosistem dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kebijakan konservasi, agar dapat menunjang kebutuhan bangsa dan negara selama mungkin.²⁰ Sumber kekayaan alam Indonesia sangat besar dan melimpah, sehingga menjadikannya potensi yang dapat dijadikan modal pembangunan nasional yang dikelola oleh Pemerintahan (Pusat dan Daerah) beserta elemen bangsa lainnya sebagai amanah rakyat. Meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya pembangunan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan, telah memunculkan tuntutan tingkat pembangunan yang lebih intens dengan hasil yang dapat dirasakan lebih merata dan adil. Tuntutan yang harus bisa dijawab dengan mendorong aktivitas ekonomi bangsa yang lebih tinggi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang menuntut ketersediaan SKA, akses dan kedaulatan terhadap pengelolaan SKA sehingga hasilnya dapat lebih dirasakan oleh semua elemen bangsa. Dengan demikian maka pengelolaan SKA yang meliputi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

¹⁹Lemhannas RI Tim Pokja. Tahun 2020. *Materi Pokok Bidang Studi Demografi*. Jakarta:

²⁰Lemhannas RI. Tahun 2022. *Materi Pokok BS. Sumber Kekayaan Alam (SKA)*. Jakarta:

besar kemakmuran rakyat harus dilaksanakan secara lebih produktif, efisien dan secara berkelanjutan. Dalam implementasinya dapat dilaksanakan dengan melalui pemanfaatan teknologi dan cara-cara yang lebih modern dan lebih efisien secara baik dan benar akan berpengaruh positif terhadap kemakmuran bangsa dan sebaliknya apabila dilakukan secara sembarangan akan menimbulkan ancaman kaitanya dengan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

3) Gatra Demografi. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 dalam berita resmi statistik No. 07/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021 jumlah penduduk Indonesia per September 2020 adalah 270,20 juta jiwa²¹. Dengan jumlah tersebut Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk paling padat nomor empat di dunia. Jumlah penduduk yang sangat besar tersebut merupakan potensi yang dapat dikerahkan secara efektif akan memberikan kontribusi yang sangat menguntungkan dalam pembangunan nasional. Usaha-usaha bela negara memerlukan sikap keuletan, tahan banting dan pekerja keras, karena tantangan yang dihadapi dengan tanggung jawab yang menjadi kewajibannya membutuhkan banyak manusia yang potensial. Jumlah penduduk yang besar dan terampil akan berpengaruh positif dalam penyelenggaraan usaha bela negara, namun sebaliknya jumlah penduduk yang besar tetapi tidak terampil akan berpengaruh negatif dan akan menjadi beban negara.

4) Gatra Ideologi. Ideologi merupakan suatu konsekuensi logis dari pandangan hidup suatu bangsa berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata nilai yang mampu memberikan stabilitas tujuan hidup sekaligus memberikan dorongan gerak menuju cita-cita yang ditetapkan²². Bagi bangsa Indonesia ideologi ditujukan untuk persatuan dan kesatuan nasional, identitas (jati diri) bangsa, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut

²¹<https://boyolalikab.bps.go.id/backend/images/Infografis-Hasil-SP2020-Indonesia-ind.jpg>, diunduh pada 10 Maret 2022 pukul 15.00 wib.

²²Lemhannas RI. Tahun 2022. *Materi Pokok Bidang Studi Ideologi*. Jakarta:

mengarahkan gatra ideologi untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam bidang kehidupan. Dalam menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, gatra ideologi berpengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran jati diri dan falsafah bangsa, namun pada sisi yang berbeda rendahnya pemahaman akan ideologi bangsa juga dapat berpengaruh negatif yang menimbulkan kerentanan terhadap persatuan bangsa.

Dihadapkan pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang serba digital, menyebabkan alur informasi dari seluruh penjuru dunia tidak dapat dikontrol, pertukaran ide, gagasan melalui teknologi informasi sangat massif, dunia tanpa batas menjadi suatu keniscayaan dan batas batas antar negara di dunia maya menjadi tidak masuk dalam logika normal. Suatu kondisi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perilaku dan pola tindak masyarakat, dan saat ini melihat kehidupan masyarakat modern dengan ciri media sosial telah menjadi kebutuhan dimana melalui media sosial seseorang dapat mengetahui berbagai ilmu dan perkembangan informasi yang sedang terjadi. Sisi negatif dari masifnya penggunaan media sosial adalah sering kali digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, oleh karena itu penggunaan media sosial harus benar-benar diperhatikan. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akibat kemajuan teknologi pada masa digitalisasi telah mengalir arus informasi ideologi transnasionalisme sebagai fenomena sosial yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dengan batasan-batasan sosial antar negara semakin kabur. Pada akhirnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu membawa hubungan keseluruhan dunia tidak serta merta mampu meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan, tetapi kenyataannya justru memperlebar jurang perbedaan. Bila dikaitkan dengan kondisi pemahaman akan ideologi nasional Pancasila masyarakat Indonesia saat ini maka perlu mewaspadaai adanya fenomena persaingan dengan ideologi

transnasional. Persaingan antar pandangan dan nilai-nilai ideologi yang dalam perkembangannya cenderung semakin meningkat aktifitasnya, mampu masuk pada berbagai aspek kehidupan melalui cara dan strategi. Dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah nyata mempengaruhi bentangan kontestasi ideologi, sehingga menjadikannya tantangan nyata terhadap ketahanan Ideologi bagi bangsa Indonesia.

5) Gatra Politik. Pancasila digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.²³ Kebijakan politik negara yang tepat sangat dibutuhkan guna membangun kesadaran masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan nasional sebagai pengaruh positif, Namun keberpihakan politik negara yang tidak mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan nasional merupakan pengaruh negatif yang hendaknya dihindari. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya guna menyaring, menghambat dan menangkal lajunya arus informasi-informasi yang mengarah pada terbentuknya kondisi perpecahan masyarakat. Penetapan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronika beserta delegasinya yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi merupakan upaya yang tepat yang secara umum ditujukan untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

6) Gatra Ekonomi. Pembangunan ekonomi belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dimana realitanya pembangunan ekonomi masih mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi.²⁴ Pembangunan

²³ Lemhannas RI Tim Pokja. Tahun 2020. *Materi Pokok Bidang Studi Politik*. Jakarta:

²⁴ Lemhannas RI Tim Pokja. Tahun 2020. *Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi*. Jakarta:

ekonomi yang tepat akan berpengaruh positif dalam melaksanakan usaha-usaha bela negara dalam hal ini meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai dasar bela negara. Namun hal tersebut juga dapat berpengaruh negatif dan menimbulkan tergerusnya sikap nilai dasar bela negara masyarakat karena masyarakat difokuskan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

7) Gatra Sosial Budaya. Budaya merupakan nilai-nilai, sikap, persepsi, mentalitas yang mencerminkan kultur masyarakat.²⁵

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang diwujudkan sebagai ukuran tuntunan sikap dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang saling tolong-menolong dan hormat menghormati merupakan salah satu modal penting dan berpengaruh positif dalam penyelenggaraan usaha bela negara, namun disisi yang berbeda kehidupan sosial budaya yang meninggalkan kearifan jatidiri bangsa akan berpengaruh negatif dan menghambat penyelenggaraan usaha bela negara.

8) Gatra Pertahanan dan Keamanan. Situasi pertahanan dan keamanan masih ditandai dengan banyaknya pelanggaran diantaranya adalah penyelundupan narkoba, pencurian ikan, pelanggaran wilayah dan terorisme. Hal ini memerlukan penguatan karakter bangsa sehingga kemandirian Ketahanan Nasional aspek Hankam dapat tercapai. Terjaganya kondisi bangsa dan negara dari tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan akan berpengaruh positif dalam menjamin usaha-usaha bela negara, namun disisi yang lain menjadi pengaruh negatif bila terjadi ketidak tangguhan Ketahanan Nasional.

²⁵ Lemhannas RI Tim Pokja. Tahun 2020. *Materi Pokok Bidang Studi Sosial Budaya*. Jakarta:

BAB III PEMBAHASAN

12. **Umum.** Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat adanya kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bentuk Kepentingan Nasional sehingga menjadi tanggung jawab dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga dan melindungi Kepentingan Nasional tersebut dari segala bentuk ancaman dan gangguan sebagai usaha pembelaan terhadap negara yang diwujudkan melalui semangat cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah, sadar berbangsa dan bernegara serta setia kepada Pancasila sebagai idiologi negara. Semangat tersebut merupakan nilai dasar bela negara, sebuah nilai dasar yang bertekad, bersikap dan berperilaku baik secara individu atau kelompok menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa yang dijiwai rasa cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari berbagai ancaman. Untuk menjamin terjaga dan terlindunginya Kepentingan Nasional, maka perlu ditanamkan dan ditumbuhkembangkan nilai-nilai dasar bela negara kepada masyarakat melalui PKBN. Bahwa PKBN diselenggarakan melalui lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan yang pada hakikatnya telah ditunaikan oleh Pemerintah. Namun capaian yang dihasilkan bila dihadapkan dengan realita kehidupan masyarakat saat ini perlu adanya upaya berupa sebuah pendekatan terhadap suatu rencana atau agenda kegiatan yang bersifat luar biasa, yang dalam implementasinya memuat unsur-unsur spektakuler dan luas diluar kebiasaan yang dilaksanakan atau yang disebut pendekatan *extraordinary*. Dipilihnya upaya tersebut tidak terlepas dari kondisi manajemen pengelolaan PKBN manajemen pengelolaan PKBN terkait sistem penyelenggaraannya yang belum terpadu, belum sinergis dan belum komprehensif serta penerapan metode yang belum mampu menumbuhkan minat dan kesadaran bela negara.

13. **Manajemen Pengelolaan PKBN Dalam Lingkup Masyarakat.**

- a. PKBN dalam lingkup masyarakat di selenggarakan melalui cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaannya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Cara yang dimaksud adalah bahwa PKBN dalam

lingkup masyarakat penyelenggaraannya oleh Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Kepala Daerah dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Untuk dapat mencapai hasil sebagaimana tujuan yang ditetapkan maka manajemen pengelolaan PKBN dalam lingkup masyarakat perlu dilakukan perubahan mengingat capaian yang dihasilkan saat ini, masih adanya permasalahan dan masa waktu pemberlakuan perundangan terkait sistem penyelenggaraan PKBN yang sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rancangan perubahan terhadap pasal-pasal perundangan beserta turunannya yang menjelaskan tentang usaha-usaha bela negara untuk diarahkan pada perwujudan sistem penyelenggaraan PKBN yang terpadu, sinergi dan komprehensif.
- 2) Pelibatan lebih dalam perangkat struktural Kemhan (Dirjen Pothan Kemhan, Unhan, Badiklat Kemhan dan khususnya PTFT Kemhan di Daerah) pada penyelenggaraan PKBN guna memperkuat asas “koordinasi” dalam pelaksanaan PKBN.
- 3) Menetapkan Rancangan Induk (*Grand Design*) PKBN untuk dapatnya bersatupadu menyatukan langkah dalam menyuarakan semangat bela negara dan cinta tanah air sebagai acuan bersama dalam membangun karakter bela negara.

b. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan mengingat dalam realitanya PKBN dalam lingkup masyarakat yang telah diupayakan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Komponen bangsa lainnya belum terpadu, belum sinergis dan belum komprehensif. Kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat sporadis dengan kecenderungan berpijak pada tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara, belum dilaksanakan secara serentak untuk mencapai tujuan yang sama, dengan menggunakan jargon dan istilah yang sama serta pengukuran keberhasilan yang sama yang mengacu pada satu pedoman sebagaimana ketentuan dalam perundangan. Termasuk gambaran akan kondisi capaian yang belum optimal karena asas pelaksanaan dilakukan dalam bentuk “koordinasi”

sehingga mengarah pada adanya perbedaan cara pandang akan pentingnya PKBN. Dapat disajikan data dan fakta sebagaimana contoh-contoh kegiatan yang diuraikan dalam data dan fakta pada BAB II seperti:

- 1) Ditjen Pothan Kemhan menggelar kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).
- 2) Kemhan melaksanakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui dengan melibatkan komponen masyarakat.
- 3) Kemhan menyelenggarakan acara Rembug Nasional Bela Negara.
- 4) Kemhan menyelenggarakan Diklat Kader Bela Negara bagi Dosen UPN Veteran Jakarta.
- 5) Pemprov. Riau memberikan pembekalan wawasan kebangsaan bagi Organisasi Laskar Melayu.
- 6) Pemprov. Riau melalui BPSDM menyelenggarakan acara *talkshow* wawasan kebangsaan.

Dengan memedomani Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers yang menyatakan bahwa sesuatu yang baru akan menimbulkan keinginan tawaran masyarakat untuk mengetahuinya, seseorang yang menemukan hal baru cenderung untuk mensosialisasikan dan menyebarkannya kepada orang lain dan penemu ingin menyebarkan sementara orang lain ingin mengetahuinya sehingga untuk menginternalisasikan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat guna mewujudkan kesadaran bela negara yang mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, maka penyelenggaraan PKBN dalam lingkup masyarakat berpedoman pada Rancangan Induk PKBN sehingga tercapai penyatuan langkah bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKBN. Selanjutnya Rancangan Induk tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan operasional PKBN hingga terciptanya kesepahaman dalam mewujudkan keterpaduan, sinergitas dan komprehensifitas secara efektif dan efisien.

c. Seiring dengan hal tersebut, pada pelaksanaan PKBN dalam lingkup masyarakat maka Kemhan harus mengoptimalkan struktural organisasinya dalam hal ini adalah Pelaksana Tugas dan Fungsi Teknis (PTFT) Kemhan di Daerah untuk diaktifkan melaksanakan penguatan asas koordinasi antar

penyelenggara (khususnya pelaksanaan di daerah) menuju sebuah sistem sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sebagai sebuah sistem dalam penyelenggaraan kegiatan melalui perangkat kebijakan PKBN yang terpadu diantara penyelenggaranya yang mencakup kegiatan membangun perangkat sistem yang terpadu, perangkat kebijakan, Sumber Daya Manusia PKBN termasuk penyiapan sarana pembinaan dan pembelajaran serta kelembagaannya. Capaian yang diharapkan dengan terpadu, sinergitas dan komprehensifnya dari penyelenggaraan PKBN yang didasari oleh sistem pelaksanaan yang baik akan mampu mencapai tujuan penyelenggaraan PKBN dalam lingkup masyarakat secara optimal. Sebuah kondisi yang diharapkan sebagaimana pemaknaan dari Teori Bela Negara Chaidir Basrie yang menyatakan bahwa bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

14. **Metode PKBN Dalam Lingkup Masyarakat.**

a. Penyelenggaraan PKBN dalam lingkup masyarakat dilaksanakan melalui penyusunan pedoman PKBN, sosialisasi dan diseminasi, pendidikan dan latihan serta pemantauan dan evaluasi. KBN dalam lingkup masyarakat ditujukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader organisasi masyarakat, kader organisasi komunitas, kader organisasi profesi, kader partai politik dan kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi membawa materi-materi PKBN yang difokuskan pada nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi nilai cinta tanah air, nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, nilai setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara serta nilai memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam penyelenggaraan kedepan perlu dilakukan adanya pengembangan metode PKBN dalam lingkup masyarakat dengan:

- 1) Melibatkan insan, tokoh, komunitas untuk bersama-sama terlibat dalam penyelenggaraan PKBN, pelibatan yang tidak hanya

sebagai obyek atau peserta PKBN tetapi dilibatkan sebagai pelaku atau aktor langsung dan bersama dalam pelaksanaannya.

- 2) Mengembangkan teknik pelaksanaan PKBN melalui pelibatan insan, tokoh dan komunitas masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal yang di gabungkan dengan bentuk kreatifitas atau inovasi kekinian yang memanfaatkan kemajuan tekologi.
- 3) Mengembangkan materi-materi PKBN melalui inovasi-inovasi kekinian dengan tetap fokus pada nilai-nilai dasar bela negara yang terkandung.
- 4) Mengembangkan metode PKBN melalui perencanaan dan program yang terpadu serta efektif dan dilaksanakan secara massif dengan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas yang telah ada dan menggunakan teknologi digital.

Pengembangan-pengembangan yang dilakukan merupakan upaya-upaya yang tidak normatif sebagaimana yang sedang diselenggarakan saat ini, tetapi merupakan upaya diluar kebiasaan yang dilakukan dan telah masuk dalam kategori *extraordinary*.

b. Kondisi sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi PKBN dalam lingkup masyarakat secara langsung sebagaimana ketentuan bahwa pelaksanaannya dilakukan melalui metode kegiatan rembuk warga, sarasehan budaya, pergelaran kebangsaan, kongres nasional serta aksi nyata dan bentuk tatap muka lainnya. Secara umum dalam pelaksanaannya menggunakan teknik ceramah, diskusi interaktif, simulasi dan tanya jawab. Dalam penyampaiannya dengan memberikan materi-materi PKBN dalam lingkup masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Materi Materi Nilai Cinta Tanah Air.
 - a) Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia;
 - b) Bangga sebagai bangsa Indonesia;
 - c) Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia;
 - d) Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia; dan

e) Mencintai produk dalam negeri, budaya dan kesenian bangsa Indonesia.

2) Materi-Materi Nilai Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

a) Memiliki kesadaran keragaman, budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat;

b) Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c) Mengenal keragaman individu di rumah dan dilingkungannya; dan

d) Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

3) Materi-Materi Nilai Setia Pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara.

a) Memahami nilai-nilai dalam Pancasila;

b) Mengamalkan nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;

c) Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara;

d) Senantiasa mengembangkan nilai Pancasila; dan

e) Setia pada Pancasila dan meyakinkannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Materi-Materi Nilai Rela Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara.

a) Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara;

b) Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman;

c) Memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara;

d) Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya; dan

e) Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di

atas kepentingan pribadi dan golongan.

5) Materi-Materi Nilai Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.

- a) Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup dalam mengatasi kesulitan;
- b) Senantiasa memelihara jiwa dan raganya;
- c) Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan;
- d) Terus membina kemampuan jasmani dan rohani; dan
- e) Memiliki kemampuan bela negara dalam bentuk keterampilan.

Pelaksanaan dengan teknik-teknik serta materi-materi tersebut bila dihadapkan dengan berbagai latar belakang masyarakat menyangkut kondisi dan strata pengetahuannya secara psikologis membawa perasaan-perasaan yang menjadi penghambat internalisasi materi nilai-nilai dasar bela negara sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaannya dirasakan membosankan sebagai bentuk pengulangan-pengulangan,
- 2) Tidak menarik karena dilakukan cenderung dengan mekanisme searah,
- 3) Materi-materinya terkesan kuno atau ketinggalan jaman, dan
- 4) Kegiatan yang dilakukan karena keterpaksaan.

Demikian juga pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi secara tidak langsung dilakukan melalui: Media cetak, Media elektronik, Media sosial dan media lainnya juga telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Tulisan-tulisan dalam bentuk artikel pada beberapa media cetak nasional, majalah, jurnal kajian dan lain-lain.
- 2) Penyelenggaraan acara-acara seperti acara talk show, film-film perjuangan, gelar hiburan dan lain-lain.
- 3) Terdapat kilasan-kilasan video pendek yang menggambarkan sikap disiplin, ketaatan, kepatuhan termasuk komedi-komedi dengan

materi nilai-nilai kebangsaan melalui media tik-tok, *youtube*, Instagram, twiter dan lain-lain.

Namun realitanya belum mengarah pada tujuan yang ditetapkan, masih merupakan kegiatan yang tidak terencana dan tidak terprogram, bersifat sporadis dan belum dilaksanakan secara massif, belum memanfaatkan seluruh sarana prasarana dan fasilitas teknologi yang ada sehingga pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi PKBN dalam lingkup masyarakat secara tidak langsung belum mampu secara optimal membangun sikap dan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia. Dengan hambatan-hambatan yang ditimbulkan tersebut, maka internalisasi nilai-nilai dasar bela negara tidak akan mencapai tujuan dalam membangun sikap dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara. Lebih jauh bila tujuan dari PKBN tidak tercapai secara optimal maka akan mempengaruhi terhadap karakter masyarakat sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa Indonesia, yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap Ketahanan Nasional.

b. Dengan berpedoman pada beberapa teori yang ada seperti:

1) Teori perilaku Kurt Lewin yang menyatakan bahwa Perilaku manusia dapat berubah sesuai harapan, apabila ada faktor pendorong yang spektakuler dan berkesan.

2) Teori rekayasa sosial Dr. Jalaludin Rakhmat yang menyatakan bahwa rekayasa terjadi karena terdapat beberapa kesalahan pemikiran manusia dalam memperlakukan masalah sosial yang disebut para ilmuwan dengan sebutan *intellectual cul-de-sac* yang menggambarkan kebuntuan berpikir. Salah satu bentuk kesalahan pemikiran lainnya adalah permasalahan sosial yang kerap dikaitkai dengan mitos ataupun kepercayaan manusia akan suatu gerakan abstrak 'ilusi' yang tanpa disadari dapat merubah tatanan kehidupan bermasyarakatnya. Untuk itu perlu diadakannya rekayasa sosial agar kesalahan-kesalahan berpikir seperti ini dapat diatasi sehingga masyarakat dapat melihat permasalahan yang dihadapinya sebagai sesuatu yang konkrit. Rekayasa sosial timbul akibat adanya sentimen atas kondisi manusia, untuk itu perlu adanya perombakan

yang dimulai dari cara pandang atau paradigma manusia atas sebuah perubahan.

3) Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers yang menyatakan bahwa difusi merupakan bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru dan lebih jauh, sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahuinya, seseorang yang menemukan hal baru cenderung untuk mensosialisasikan dan menyebarkannya kepada orang lain dan penemu ingin menyebarkan sementara orang lain ingin mengetahuinya.

diharapkan dapat mengarahkan pengembangan metode yang dilakukan mampu menumbuhkan dan meningkatkan sikap bela negara sebagaimana tujuan yang ditetapkan. Peluang yang ada adalah bahwa globalisasi yang disertai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat khususnya hubungan kehidupannya menggunakan Medsos. Indonesia dengan jumlah penduduk ± 270 jiwa menjadi salah satu negara yang menggunakan media internet terbesar di dunia, dan mengalami pelonjakan penggunaannya seiring fenomena Pandemi Covid-19 yang didukung oleh kehadiran infrastruktur internet cepat dan massifnya transformasi digital. Masyarakat semakin lebih cepat dalam mengakses informasi dan dapat memperkaya wawasan berfikir, bersikap dan bertindak, begitu juga seharusnya dalam implementasi terhadap pemahaman tentang bela negara. Indonesia harus dapat mentransformasikan serta memanfaatkan teknologi media dalam rangka melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, membangun dan meningkatkan rasa persatuan bangsa, edukasi dan literasi media mencegah massifnya informasi berita *hoax* yang bertebaran di dunia maya guna menjaga Pancasila terhadap pengaruh ideologi transnasional. Kemajuan teknologi juga telah melahirkan bentuk ancaman yang sangat bervariasi serta kompleks, sehingga hanya bangsa yang mempunyai keunggulan penguasaan teknologi dan informasi yang mampu bersaing dan menang dalam pertarungan global. Perkembangan dan persaingan di era-globalisasi sangat diperlukan pemahaman kesadaran bela negara bagi

warga negara sesuai situasi dan kondisi, serta bentuk ancaman dan tantangan yang dihadapi. Ancaman saat ini bukan hanya ancaman militer, tapi juga ancaman non militer yang mencakup aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Pertahanan dan Keamanan seperti; persaingan global, perdagangan bebas, lemahnya SDM, sosial budaya, kemajemukan, intoleransi, nasionalisme dan derasnya arus informasi di media sosial yang membawa efek luar biasa bagi kaum melinial. Maraknya berita bohong atau *hoaks*, ujaran kebencian atau *hate speech* dan adu domba dapat dijadikan alat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu warga negara khususnya generasi muda harus bisa menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman tersebut, warga negara khususnya generasi muda memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik untuk memerangi bohong atau *hoaks* dan ujaran kebencian atau *hate speech* yang sangat membahayakan pola pemikiran generasi penerus bangsa. Kesadaran bela negara dapat dibangun dan diterima melalui media sosial secara visual dengan menunjukkan keberhasilan berbagai bidang dalam pembangunan dan menampilkan keteladanan tokoh masyarakat, pemimpin atau aparatur negara sebagai panutan sesuai budaya *paternalistik* yang masih mengakar dalam masyarakat Indonesia. Melalui konten-konten dan informasi terkait nilai-nilai bela negara dapat dituangkan dan diedukasikan kepada publik melalui media sosial dengan kemasan dan bahasa yang sederhana serta menarik di media, misalnya dalam mencintai produksi dalam negeri sehingga efek ini berlaku kepada publik secara keseluruhan yang terpapar oleh konten bela negara dapat dilakukan secara langsung melalui situs pemerintah. Salah satu cara sederhana yang dapat juga dilakukan adalah menghimbau seluruh aparat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyebarkan informasi keberhasilan pembangunan serta menyebar luaskan nilai-nilai dasar bela negara melalui media sosial sehingga dapat meningkatkan rasa nasionalisme.

c. Proses pembangunan dan regulasi harus mencerminkan adanya rasa keadilan dan pemerataan di semua wilayah, disamping itu juga harus memberikan peluang, kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dan partisipasi agar mereka lebih inovatif dan kreatif

kearah kebaikan melalui berbagai bidang dan minat masing-masing, dengan demikian masyarakat diharapkan bisa belajar dan terlibat tanpa disadari mereka sudah terlibat dalam kegiatan bela negara. Dengan demikian terbentuknya rasa bela negara terlihat dalam wujud perilaku yang mencerminkan sikap disiplin sehingga terbentuk mental dan fisik yang Tangguh, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas anak bangsa, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan tanah air serta terbentuknya sikap iman dan taqwa yang menumbuhkan rasa berbakti pada orang tua. Pada akhirnya bahwa tujuan PKBN adalah mengaktualisasikan nilai bela negara dan optimisme kepada warga negara demi mewujudkan kesadaran bela negara yang dapat mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Sikap kesadaran bela negara sebagai karakter warga negara yang dapat diandalkan sebagai penangkal berbagai ancaman terhadap NKRI. Sikap warga negara yang memiliki mental dan karakter bela negara akan terbangun watak cinta tanah air, sadar dalam berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik. Membangun karakter bangsa telah selaras dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Nasionalnya dengan menetapkan Visi diantaranya adalah “Revolusi Mental” yang bertujuan membangun kesadaran bela negara dan kemampuan bela negara serta membangun kekuatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

15. **Strategi dan Upaya PKBN Dalam Lingkup Masyarakat.**

PKBN merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Mencermati kondisi kesadaran bela negara saat ini, dihadapkan dengan dinamika global yang mempengaruhi pola dan bentuk ancaman sehingga mendorong untuk kesadaran bela negara dapat secara terus menerus ditanamkan kepada warga negara. Dihadapkan dengan berbagai permasalahan PKBN yang

telah dilakukan maka perlu dirumuskan Strategi beserta Upaya-Upaya untuk dapat menumbuhkan niat dan kesadaran bela negara.

a. **Strategi.**

1) **Strategi Pertama.** Mewujudkan manajemen pengelolaan PKBN dalam lingkup masyarakat melalui perubahan Pasal-Pasal Perundang-Undangan yang menjelaskan tentang upaya bela negara dan menyusun pedoman PKBN dengan memberdayakan DPR, Pemerintah, Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintah, Pemda dan komponen masyarakat terkait guna keterpaduan, sinergitas dan komprehensif penyelenggaraan PKBN.

2) **Strategi Kedua.** Mewujudkan metode PKBN dalam lingkup masyarakat melalui pengembangan-pengembangan dengan melibatkan tokoh, insan dan komunitas masyarakat serta materi-materi fokus pada nilai-nilai dasar bela negara dengan memanfaatkan kearifan lokal, kreativitas dan inovasi yang digabungkan dengan menggunakan teknologi guna menumbuhkan minat dan kesadaran bela negara.

b. **Upaya-Upaya.**

1) **Upaya Terhadap Strategi Pertama,** Mewujudkan manajemen pengelolaan PKBN dalam lingkup masyarakat melalui perubahan Pasal-Pasal Perundang-Undangan yang menjelaskan tentang upaya bela negara dan menyusun pedoman PKBN dengan memberdayakan DPR, Pemerintah, Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintah, Pemda dan komponen masyarakat terkait guna keterpaduan, sinergitas dan komprehensif penyelenggaraan PKBN. melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a) Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintahan, Pemda dan komponen bangsa yang terkait melaksanakan evaluasi Pasal-Pasal Perundang-Undangan yang menjelaskan usaha-usaha bela negara selanjutnya menyusun rancangan perubahan Perundang-Undangan untuk

diarahkan pada terwujudnya sistem penyelenggaraan yang terpadu, sinergi dan komprehensif.

b) Kemhan mengajukan rancangan perubahan Perundang-Undangan yang disusun untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan DPR.

c) DPR membahas rancangan perubahan Perundang-Undangan yang diajukan untuk disetujui dan ditetapkan menjadi perubahan Perundang-Undangan.

d) Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintahan, Pemda dan komponen bangsa terkait menyusun Rancangan Induk (*Grand Design*) beserta operasional penyelenggaraan PKBN sampai dengan standarisasi metode dan materi kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara.

e) Kemhan mengoptimalkan perangkat strukturalnya dalam hal ini PTFT Kemhan di Daerah untuk penguatan asas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan PKBN.

2) **Upaya Terhadap Strategi Kedua.** Mewujudkan metode PKBN dalam lingkup masyarakat melalui pengembangan-pengembangan dengan melibatkan tokoh, insan dan komunitas masyarakat serta materi-materi fokus pada nilai-nilai dasar bela negara dengan memanfaatkan kearifan lokal, kreativitas dan inovasi yang digabungkan dengan menggunakan teknologi guna menumbuhkan minat dan kesadaran bela negara melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a) Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintahan, Pemda dan komponen bangsa terkait menyusun dan menetapkan standarisasi metode penyelenggaraan PKBN dengan materi-materi yang fokus pada nilai-nilai dasar bela negara melalui kegiatan internalisasi.

b) Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintahan, Pemda dan komponen bangsa terkait

menyelenggarakan kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara di tingkat Pusat dan Daerah melalui pengembangan teknik pelaksanaannya dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat.

c) Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintah, Pemda dan komponen bangsa terkait menyelenggarakan kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara di tingkat Pusat dan Daerah melalui pengembangan teknik pelaksanaannya menggunakan sarana prasarana dan fasilitas dengan inovasi dan kreativitas menggunakan teknologi.

d) Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintah, Pemda dan komponen bangsa terkait menyelenggarakan kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara di tingkat Pusat dan Daerah diselenggarakan secara massif dengan terencana dan terprogram.

e) Kemhan memberikan sertifikat tanda penghargaan dan kartu tanda anggota bagi masyarakat yang telah dididik dan dilatih sebagai kader bela negara.

f) Kemenhan mengajukan tambahan anggaran untuk memberikan insentif kepada kader bela negara sebagai penghargaan dalam rentang waktu saat melakukan penyelenggaraan PKBN.

g) Kemhan mengelola "pusat data" penyelenggaraan PKBN di tingkat Pusat dan Daerah.

h) Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintahan, Pemda dan komponen bangsa terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PKBN.

Pemilihan strategi dan upaya sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari bagaimana strategi penyelenggaraan PKBN dalam lingkup masyarakat yang ditetapkan sebelumnya belum menegaskan adanya satu rumusan cara (*ways*), sumberdaya (*means*), tujuan (*ends*) yang ada untuk mencapai tujuan sesuai

masing masing pemecahan masalah yang tercantum dalam kebijakan. Termasuk upaya-upaya yang dilakukan belum mengurai secara tegas terkait cara/tindakan nyata dari masing-masing strategi, berisi siapa yang berbuat (subyek), terhadap apa (obyek/sasaran), dengan cara apa (metode).

16. **Korelasi PKBN dan Memantapkan Ketahanan Nasional.**

a. Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban untuk menghadapi setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah yuridiksi nasional serta nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Esensi bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara sekaligus upaya setiap warga negara untuk mempertahankan NKRI terhadap setiap ancaman yang merupakan amanah konstitusi yang menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dalam pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara sebagai konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara. Keberhasilan pelaksanaan bela negara merupakan keberhasilan bangsa dalam membangun dan meningkatkan dasar-dasar yang kokoh bagi eksistensinya dimasa depan.

b. Peran bela negara dalam menentukan kualitas ketahanan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah konsep pertahanan negara saat masa damai maupun masa perang yang didasarkan pada refleksi spektrum bela negara yang harus dipahami oleh semua warga negara. Bahwa setiap warga negara untuk senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan ruang hidup serta kepentingan nasionalnya tidak hanya dimaknai melalui pemahaman bela negara secara fisik dengan memanggul senjata, namun dipahami secara kontekstual dengan lebih luas. Dalam bentuk lunak masuk klasifikasi aspek psikologis yang tercermin dalam jiwa, karakter, sikap dan jati diri setiap warga negara. Sedangkan aspek fisik

perwujudannya dalam bentuk tindakan nyata dalam berbagai perilaku keseharian yang membanggakan negara Indonesia. Bahwa dalam konteks yang lebih luas negara telah menyusun suatu doktrin dan sistem pertahanan semesta yang mekanismenya ditetapkan dalam Perundang-Undangan yang mengatur akan peran, tugas dan tanggung jawab dari komponen-komponen yang terlibat (Komut, Komcad dan Komduk). Mencermati hal tersebut, maka PKBN harus diselenggarakan secara massif, berkelanjutan dan tidak boleh terputus. Pemahaman dan peningkatan kesadaran bela negara pada saat masa damai menjadi kunci keberhasilan dari terselenggaranya peran bela negara yang dapat menentukan kualitas dari pertahanan negara.

c. Pada perkembangannya, ancaman terhadap kedaulatan negara telah berkembang dengan adanya adaptasi terhadap kondisi yang mempengaruhinya, ancaman yang semula bersifat konvensional atau bersifat fisik telah berkembang dengan sifat multidimensional atau bersifat fisik dan non-fisik yang mampu beradaptasi pada aspek-aspek bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan. Beberapa bentuk ancaman yang bersifat multidimensional antara lain: terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut dan perusakan lingkungan. Pada akhirnya ancaman bisa dimaknai sebagai usaha dan kegiatan yang memiliki potensi membahayakan terhadap kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mencermati pemaknaan yang diuraikan diatas, bahwa ancaman mencakup hal yang sangat luas dan spektrum yang selalu dinamis dari waktu ke waktu. Seiring era-globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi, kemungkinan ancaman yang akan menyerang terhadap bangsa Indonesia adalah bentuk-bentuk tindak kejahatan yang terkoordinir oleh aktor-aktor bukan negara (*non state actor*) melalui strategi yang dilaksanakan dengan mendapatkan peluang menggunakan manipulasi kondisi dan kondisi keterbatasan aparaturnya. Strategi yang ditetapkan dilaksanakan melalui penghancuran nilai-nilai kemanusiaan dan budaya dengan cara menyebarkan berita-berita bohong dan ujaran kebencian sebagai sarana propaganda. Bahwa ancaman telah merasuk dalam Negara Indonesia yang ditandai dengan berkembangnya nilai-nilai

yang bukan merupakan bentuk perilaku dan budaya Bangsa Indonesia seperti sikap individualisme, sikap acuh tak acuh, sikap bermusuhan antar sesama anak bangsa dan lain-lain. Semakin kompleks dan berkembangnya ancaman saat ini, maka perlu kerja keras untuk meningkatkan minat dan kesadaran bela negara bagi warga negara tanpa ketercuali.

d. Ketahanan berasal dari kata tahan yang artinya kuat, dapat dimaknai dengan kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Istilah nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah menegara. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala macam bentuk ATHG yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung dan tidak langsung yang membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai Tujuan Nasional sebagai sebuah pemaknaan Ketahanan Nasional sebagaimana teori Ketahanan Nasional Soewarso Harjosoedarmo. Ketahanan Nasional Indonesia Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah, Ketahanan nasional sebagai kondisi akan selalu mewujudkan dinamika sejalan dengan keadaan atau obyektif yang ada dimasyarakat. Masalah pokok Ketahanan Nasional ditinjau dari sudut geopolitik dapat dilihat dari bagaimana menghadapi paham geopolitik negara-negara lain, terutama negara yang mengandalkan konsep kekuatan dan bertujuan menciptakan kondisi penguasaan dan dominasi. Masalah berikutnya adalah bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang simetris dengan negara-negara lain, dimana hubungan simetris yang dimaksudkan sebagai hubungan yang didasari pada motivasi kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

e. Bahwa kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha warga negara untuk mewujudkan Ketahanan Nasional, bentuk usaha yang dilaksanakan melalui sikap dan kesadaran dengan penuh tekad dan semangat yang dijiwai oleh tegak dan kokohnya NKRI berdasarkan

Pancasila dan UUD NRI 1945. Sedangkan Ketahanan Nasional merupakan kondisi totalitas dari seluruh aspek kehidupan yang berdasarkan wawasan nasionalnya untuk mencapai daya tangkal dan mampu melaksanakan interaksi bersama lingkungannya untuk dapat menjamin dan melindungi kelangsungan hidupnya sesuai cita-cita yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Nasional merupakan strategi dalam mempertahankan dan membela negara. Mencermati pemaknaan bela Negara dan Ketahanan Nasional sebagaimana diuraikan diatas, bahwa realitanya terdapat keterkaitan yang sangat kuat diantara keduanya dimana guna mewujudkan Tujuan Nasional serta menjamin dan melindungi Kepentingan Nasional diperlukan tekad dan sikap warga Negara dalam bentuk usaha-usaha bela negara dalam membentuk karakter.



BAB IV PENUTUP

17. **Simpulan.**

a. Semangat rasa cinta tanah air, sikap kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran untuk setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, sikap rela berkorban dan kemampuan awal bela negara merupakan nilai dasar bela negara. Sebuah nilai dasar yang bertekad, bersikap dan berperilaku sebagai tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia dari berbagai ancaman. Untuk menjamin terjaga dan terlindunginya Kepentingan Nasional maka nilai dasar bela negara tersebut perlu ditanamkan dan ditumbuhkan kepada setiap insan rakyat Indonesia melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Bahwa kegiatan PKBN dalam lingkup masyarakat telah diselenggarakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan dengan program-program kegiatan melalui sosialisasi dan diseminasi, Diklat serta pengawasan dan evaluasi. Namun capaian yang dihasilkan belum mampu membangun sikap mental serta karakter warga negara yang memiliki nilai-nilai dasar bela negara. Capaian yang diraih pada kondisi yang tidak optimal tersebut tidak terlepas dari manajemen pengelolaan PKBN terkait sistem penyelenggaraannya yang belum terpadu, belum sinergis dan belum komprehensif serta penerapan metode yang belum mampu menumbuhkan minat dan kesadaran bela negara.

b. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan PKBN dalam lingkup masyarakat yang telah dilaksanakan, menggambarkan adanya sistem penyelenggaraan PKBN yang belum terpadu, belum sinergis dan belum komprehensif. Kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat sporadis dengan kecenderungan berpijak pada tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara, belum dilaksanakan secara serentak untuk mencapai tujuan

yang sama, dengan menggunakan jargon dan istilah yang sama serta pengukuran keberhasilan yang sama yang mengacu pada satu pedoman sebagaimana ketentuan dalam perundangan. Data dan fakta yang ada masih menggambarkan kondisi capaian yang belum optimal karena asas pelaksanaan dilakukan dalam bentuk “koordinasi” sehingga mengarah pada adanya perbedaan cara pandang akan pentingnya PKBN. Menganalisa akan ketentuan yang ditetapkan, kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian serta permasalahan yang ada, dengan memaknai Teori Perilaku Kurt Lewin diharapkan Kemhan melakukan pendekatan diluar kebiasaan dengan upaya-upaya seperti: menyusun rancangan perubahan terhadap pasal-pasal Perundangan beserta turunannya yang menjelaskan tentang usaha-usaha bela negara untuk diarahkan pada perwujudan sistem penyelenggaraan PKBN yang terpadu, sinergi dan komprehensif, melibatkan lebih dalam perangkat struktural Kemhan (Dirjen Pothan Kemhan, Unhan, Badiklat Kemhan dan PTFT Kemhan di Daerah) pada penyelenggaraan PKBN guna memperkuat asas “koordinasi” dalam pelaksanaan PKBN serta menetapkan Rancangan Induk (*Grand Design*) PKBN untuk menyatukan langkah dalam menyuarakan semangat bela negara dan cinta tanah air sebagai acuan bersama dalam membangun karakter bela negara.

c. Termasuk masalah metode yang dilaksanakan melalui kegiatan Internalisasi dengan tujuan untuk mensosialisasikan dan mendiseminasikan penguatan nilai-nilai bela negara kepada seluruh warga negara. Dimana sosialisasi dan diseminasi yang dilaksanakan dengan menanamkan materi-materi PKBN yang fokus pada nilai-nilai dasar bela negara. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi dilakukan melalui teknik ceramah, diskusi interaktif, simulasi dan tanya jawab yang justru membawa dampak sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaannya dirasakan membosankan sebagai bentuk pengulangan-pengulangan, tidak menarik karena dilakukan cenderung dengan mekanisme searah, materi-materinya terkesan kuno atau ketinggalan jaman dan kegiatan yang dilakukan karena keterpaksaan sehingga kondisi psikologis tersebut menjadi

penghambat proses internalisasi nilai-nilai dasar bela negara dalam lingkup masyarakat.

2) Dalam realitanya, pelaksanaan PKBN dalam lingkup masyarakat belum mengarah pada tujuan yang ditetapkan, masih merupakan kegiatan secara sporadis belum dilaksanakan secara massif, tidak terencana dan tidak terprogram, belum memanfaatkan secara optimal sarana prasarana dan fasilitas yang digabungkan dengan kreativitas dan inovasi menggunakan teknologi yang ada sehingga metode pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi PKBN dalam lingkup masyarakat belum mampu secara optimal membangun sikap dan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.

Dihadapkan dengan perkembangan teknologi dan kecepatan informasi, telah mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat khususnya hubungan yang terjadi melalui media sosial. Kemajuan teknologi harus dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus dapat dimanfaatkan untuk membangun sikap persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Kemajuan teknologi dan informasi juga bisa dijadikan sarana untuk mendidik dan menambah pengetahuan melalui media guna mereduksi berita-berita bohong serta melindungi masuknya ideologi transnasional yang sangat massif bertebaran di dunia maya yang berusaha mempengaruhi keteguhan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang hingga melahirkan ancaman yang sangat kompleks sehingga dapat disimpulkan bahwa penguasaan teknologi akan membawa pada kejayaan dan keunggulan serta kegemilangan dalam pertarungan global.

Mencermati dinamika global yang terjadi, sangat diperlukan akan tingginya sikap dan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara dengan melakukan adaptasi sesuai masa atau waktu kekinian serta ancaman yang dihadapi. Dengan menggunakan informasi-informasi melalui media dapat disampaikan nilai-nilai dasar bela negara sebagai wahana pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa sederhana dan inovasi kreatif yang menarik di media.

Menganalisa hambatan-hambatan yang ditimbulkan, peluang-peluang yang ada dan sumberdaya yang dimiliki, serta memaknai teori perilaku Kurt Lewin, teori rekayasa sosial Dr Jalaludin Rakhmat serta Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers sudah waktunya dilakukan pengembangan metoda PKBN dalam lingkup masyarakat melalui upaya-upaya yang tidak normatif sebagaimana yang sedang diselenggarakan, tetapi merupakan upaya diluar kebiasaan sebagai berikut:

- 1) Melibatkan insan, tokoh, komunitas untuk bersama-sama terlibat dalam penyelenggaraan PKBN, pelibatan yang tidak hanya sebagai obyek atau peserta PKBN tetapi dilibatkan sebagai pelaku atau aktor langsung dan bersama dalam pelaksanaannya.
- 2) Mengembangkan teknik pelaksanaan PKBN melalui pelibatan insan, tokoh dan komunitas masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal yang di gabungkan dengan bentuk kreatifitas atau inovasi kekinian yang memanfaatkan kemajuan teknologi.
- 3) Mengembangkan materi-materi PKBN melalui inovasi-inovasi kekinian dengan tetap fokus pada nilai-nilai dasar bela negara yang terkandung.
- 4) Mengembangkan metode PKBN melalui perencanaan dan program yang terpadu serta efektif dan dilaksanakan secara massif dengan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas yang telah ada dan menggunakan teknologi digital.

d. Menceramati kondisi kesadaran bela negara saat ini dan dihadapkan dengan dinamika global yang mempengaruhi pola serta bentuk ancaman, mendorong untuk kesadaran bela negara dapat secara terus menerus ditanamkan kepada warga negara serta berbagai permasalahan PKBN dalam lingkup masyarakat yang telah dilakukan sehingga perlu dirumuskan Strategi sebagai berikut: **Strategi Pertama**, Mewujudkan manajemen pengelolaan PKBN dalam lingkup masyarakat melalui perubahan Pasal-Pasal Perundang-Undangan yang menjelaskan tentang upaya bela negara dan menyusun pedoman PKBN dengan memberdayakan DPR, Pemerintah, Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintah, Pemda dan komponen masyarakat terkait guna keterpaduan, sinergitas dan komprehensif

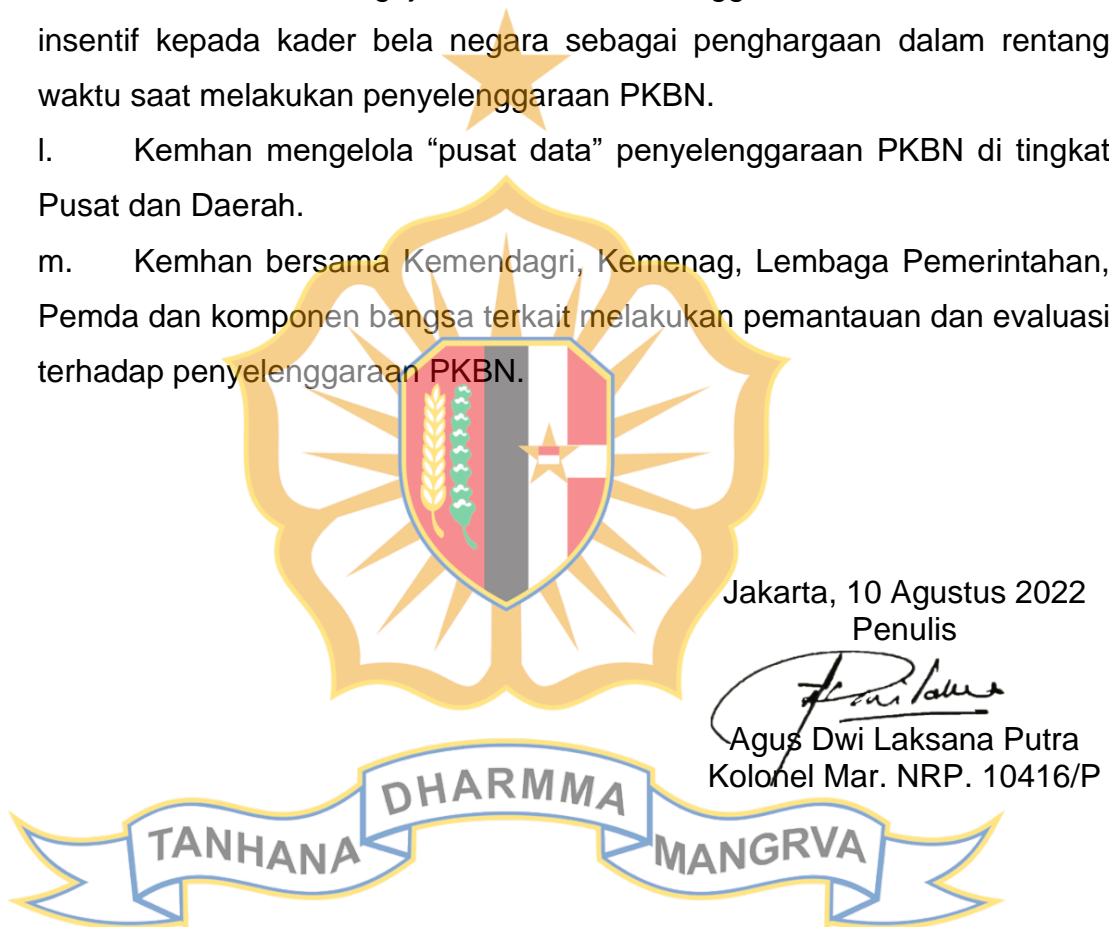
penyelenggaraan PKBN dan **Strategi Kedua**, Mewujudkan metode PKBN dalam lingkup masyarakat melalui pengembangan-pengembangan dengan melibatkan tokoh, insan dan komunitas masyarakat serta materi-materi fokus pada nilai-nilai dasar bela negara dengan memanfaatkan kearifan lokal, kreativitas dan inovasi yang digabungkan dengan menggunakan teknologi guna menumbuhkan minat dan kesadaran bela negara.

e. Bahwa nilai-nilai bela negara menjadi pijakan dalam membangun kekuatan nasional yang akan menjadi kekuatan pertahanan negara Indonesia yang tangguh dan kuat. Komponen tersebut menjadi prasyarat dari sudut pandang harus selalu dibina dan dikembangkan secara terus menerus, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bela negara bukan hanya sebuah retorika melainkan juga harus diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh komponen bangsa, utamanya dalam lingkup masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengerjakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam bela negara dari perspektif Ketahanan Nasional.

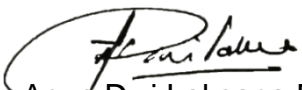
18. **Rekomendasi.** Peran bela negara dalam menentukan kualitas ketahanan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah konsep pertahanan negara saat masa damai maupun masa perang yang didasarkan pada refleksi spektrum bela negara yang harus dipahami oleh semua warga negara. Bela negara dan Ketahanan Nasional mempunyai hubungan yang sangat erat dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional sebagaimana Amanah konstitusi NKRI. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bela negara dan Ketahanan Nasional mempunyai keterkaitan dalam mewujudkan tujuan negara melalui proses pembentukan karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan makna bahwa kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan Ketahanan Nasional. Maka guna terbangunnya sikap dan kesadaran bela negara dari penyelenggaraan PKBN dalam lingkup masyarakat, disarankan kepada pihak terkait untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintahan, Pemda dan komponen bangsa yang terkait melaksanakan evaluasi Pasal-Pasal Perundang-Undangan yang menjelaskan usaha-usaha bela negara selanjutnya menyusun rancangan perubahan Perundang-Undangan untuk diarahkan pada terwujudnya sistem penyelenggaraan yang terpadu, sinergi dan komprehensif.
- b. Kemhan mengajukan rancangan perubahan Perundang-Undangan yang disusun untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan DPR.
- c. DPR membahas rancangan perubahan Perundang-Undangan yang diajukan untuk disetujui dan ditetapkan menjadi perubahan Perundang-Undangan.
- d. Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintahan, Pemda dan komponen bangsa terkait menyusun Rancangan Induk (*Grand Design*) beserta operasional penyelenggaraan PKBN sampai dengan standarisasi metode dan materi kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara.
- e. Kemhan mengoptimalkan perangkat strukturalnya dalam hal ini PTFT Kemhan di Daerah untuk penguatan asas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan PKBN.
- f. Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintahan, Pemda dan komponen bangsa terkait menyusun dan menetapkan standarisasi metode penyelenggaraan PKBN dengan materi-materi yang fokus pada nilai-nilai dasar bela negara melalui kegiatan internalisasi.
- g. Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintah, Pemda dan komponen bangsa terkait menyelenggarakan kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara di tingkat Pusat dan Daerah melalui pengembangan teknik pelaksanaannya dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat.
- h. Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintah, Pemda dan komponen bangsa terkait menyelenggarakan kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara di tingkat Pusat dan Daerah melalui pengembangan teknik pelaksanaannya menggunakan sarana prasarana dan fasilitas dengan inovasi dan kreativitas menggunakan teknologi.

- i. Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintah, Pemda dan komponen bangsa terkait menyelenggarakan kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara di tingkat Pusat dan Daerah diselenggarakan secara massif dengan terencana dan terprogram.
- j. Kemhan memberikan sertifikat tanda penghargaan dan kartu tanda anggota bagi masyarakat yang telah di didik dan dilatih sebagai kader bela negara.
- k. Kemenhan mengajukan tambahan anggaran untuk memberikan insentif kepada kader bela negara sebagai penghargaan dalam rentang waktu saat melakukan penyelenggaraan PKBN.
- l. Kemhan mengelola “pusat data” penyelenggaraan PKBN di tingkat Pusat dan Daerah.
- m. Kemhan bersama Kemendagri, Kemenag, Lembaga Pemerintahan, Pemda dan komponen bangsa terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PKBN.



Jakarta, 10 Agustus 2022
Penulis


Agus Dwi Laksana Putra
Kolonel Mar. NRP. 10416/P

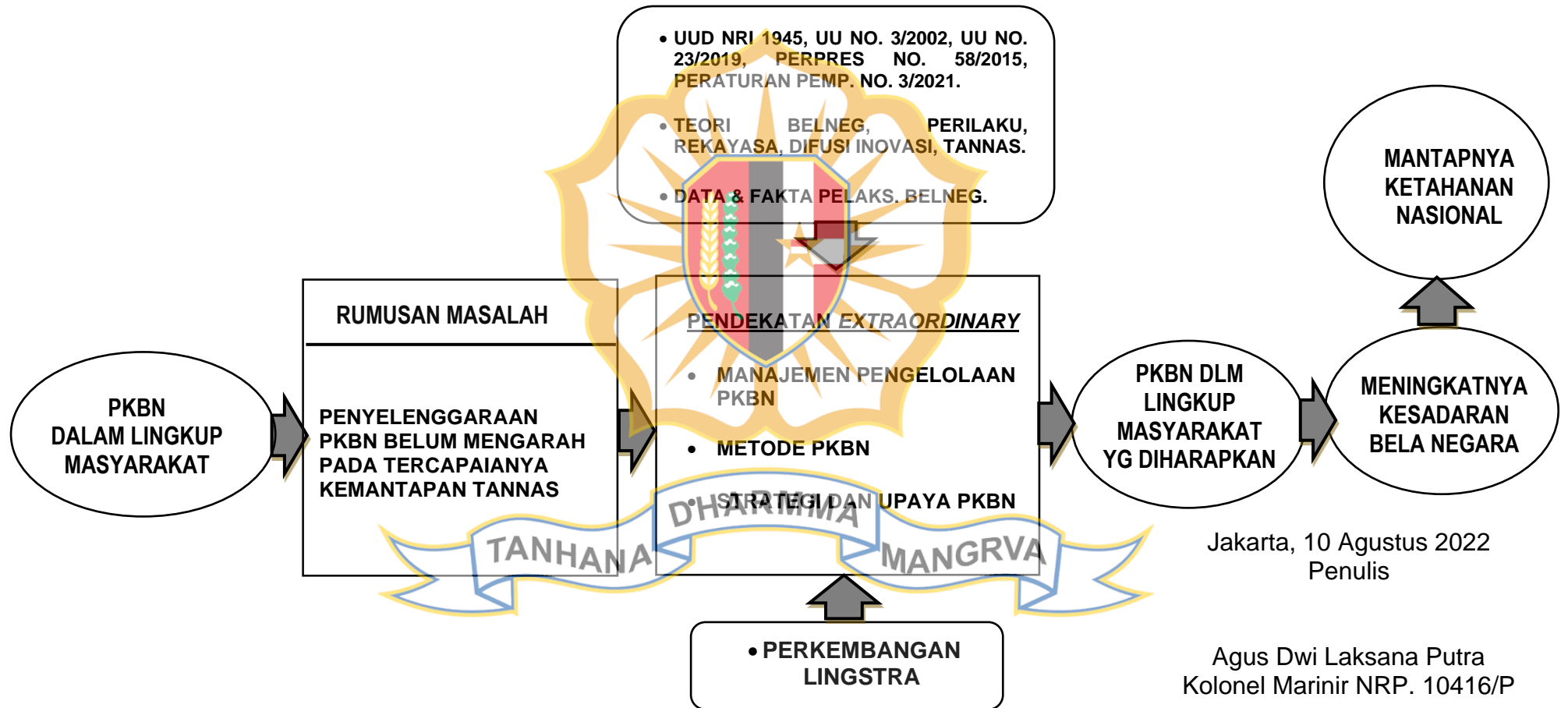
DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, CV. Pustaka Agung Harapan Surabaya. 2009.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
- Mabes TNI. Doktrin Tentara Nasional Indonesia, Tri Dharma Eka Karma, Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/555.a/VI/2018 Tanggal 1 Juli 2019.
- Budiyo, Dr. H. Kabul, M.Si. Nilai-nilai kepribadian dan kejuangan Bangsa Indonesia, 2007
- Dinas sejarah AD. 2014. Palagan Ambarawa (menumbuhkan kepercayaan pada kekuatan sendiri).
- Jalaluddin Rakhmat. Tahun 1999. *Rekayasa Sosial Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Pendidikan Kewarganegaraan.
- Suryo Prabowo Letjen TNI Purn.J. 2009. *Membangun kemampuan MEMIMPIN dalam kehidupan keprajuritan*.
- Elvinaro Ardianto, dkk. Tahun 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Wiryadi. Tahun 2003. *Peran Nuklir Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Kajian Strategik Ketahanan Nasional.
- Lemhannas RI. Tahun 2022. *Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta:
- Lemhannas RI. Tahun 2022. *Materi Pokok BS. Sumber Kekayaan Alam (SKA)*. Jakarta:
- Lemhannas RI. Tahun 2022. *Materi Pokok Bidang Studi Ideologi*. Jakarta:
- Lemhannas RI Tim Pokja. Tahun 2020. *Materi Pokok Bidang Studi Politik*. Jakarta:

- Lemhannas RI Tim Pokja. Tahun 2020. *Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi*. Jakarta:
- Lemhannas RI Tim Pokja. Tahun 2020. *Materi Pokok Bidang Studi Sosial Budaya*. Jakarta:
- Lemhannas RI Tim Pokja. Tahun 2020. *Materi Pokok Bidang Studi Demografi*. Jakarta:
- <http://adehotimatanjung.blogspot.com/2013/05/motivasi-bela-negara-berdasarkan.html>, diunduh pada 06 Feb 2022 pukul 15.18 wib.
- <http://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/extraordinary>, diunduh tanggal 10 April 2022 pukul 15.22 WIB.
- <https://www.kemhan.go.id/2019/03/01/menhan-membuka-acara-pembinaan-kesadaran-bela-negara-bagi-pemuda-pancasila.html>, diunduh pada 1 Maret 2022 pukul 22.22 WIB.
- <https://www.kemhan.go.id/2021/11/22/diklat-kader-bela-negara-diharapkan-dapat-menumbuhkembangkan-kesadaran-berbangsa-dan-bernegara.html>, diunduh pada 2 Maret 2022 pukul 21.20 WIB.
- <https://bpsdm.riau.go.id/bpsdm/talkshow-wawasan-kebangsaan-di-provinsi-riau-tahun-2022/>, diunduh pada 2 Maret 2022 pukul 22.12 WIB.
- <https://www.kemhan.go.id/2022/01/17/kabadiklat-kemhan-hakekat-pembinaan-kesadaran-bela-negara-adalah-untuk-bangun-karakter-bangsa.html>, diunduh pada 2 Maret 2022 pukul 22.12 WIB.
- <https://boyalalikab.bps.go.id/backend/images/Infografis-Hasil-SP2020-Indonesia-ind.jpg>, diunduh pada 10 Maret 2022 pukul 15.00 wib.
- <https://infopublik.id/kategori/nusantara/591030/buka-pembekalan-kebangsaan-gubri-ajak-satukan-gagasan-untuk-kemajuan-bangsa>, diunduh pada 28 Maret 2022 pukul 16.30 WIB.
- <https://www.kemhan.go.id/2021/06/17/pembinaan-bela-negara-penting-untuk-bangun-daya-tangkal-bangsa.html>, diunduh pada 28 Maret 2022 pukul 19.36 WIB.
- <https://www.kemhan.go.id/2015/05/08/kemhan-susun-grand-design-pembinaan-kesadaran-bela-negara.html>, diunduh pada 30 Maret 2022 pukul 15.40 WIB.
- <https://www.kemhan.go.id/2016/02/12/kemhan-tandatangani-kesepakatan-bersama-dengan-20-ormas-dalam-pembinaan-kesadaran-bela-negara.html>, diunduh pada 1 April 2022 pukul 20.00 WIB.
- <https://dunia.tempo.co/read/886917/pbb-jumlah-penduduk-dunia-98-miliar-tahun-2050>, diunduh pada 15 April 2022 pukul 21.15 WIB.

ALUR PIKIR

PENDEKATAN *EXTRAORDINARY* PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA GUNA MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL



DAFTAR GAMBAR

1. **Kemhan Susun *Grand Design* PKBN.**



Gambar 1: Rapat penyusun *Grand Design* Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), 2015. <https://www.kemhan.go.id/2015/05/08/kemhan-susun-grand-design-pembinaan-kesadaran-bela-negara.html>, diunduh pada 30 Maret 2022 pukul 15.40 WIB.

2. **PKBN Bagi Pemuda Pancasila.**



Gambar 2. Acara Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kepada 108 Peserta Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila Tahun 2019. <https://www.kemhan.go.id/2019/03/01/menhan-membuka-acara-pembinaan-kesadaran-bela-negara-bagi-pemuda-pancasila.html>, diunduh pada 1 Maret 2022 pukul 22.22 WIB.

3. Pembinaan Bela Negara.



Gambar 3. Kapusdiklat Kemhan melaksanakan Pembinaan Bela Negara 2021. <https://www.kemhan.go.id/2021/06/17/pembinaan-bela-negara-penting-untuk-bangun-daya-tangkal-bangsa.html>, diunduh pada 28 Maret 2022 pukul 19.36 WIB.

4. Diklat Kader Bela Negara.



Gambar 4. Diklat Kader Bela Negara, 2021. <https://www.kemhan.go.id/2021/11/22/diklat-kader-bela-negara-diharapkan-dapat-menumbuhkembangkan-kesadaran-berbangsa-dan-bernegara.html>, diunduh pada 2 Maret 2022 pukul 21.20 WIB.

5. Talkshow Wawasan Kebangsaan



Gambar 5. Kegiatan Talkshow Wawasan Kebangsaan di Prov. Riau, 2022. <https://bpsdm.riau.go.id/bpsdm/talkshow-wawasan-kebangsaan-di-provinsi-riau-tahun-2022/>, diunduh pada 2 Maret 2022 pukul 22.12 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



1. Nama lengkap : Agus Dwi Laksana Putra
2. Pangkat/Korps/NRP : Kolonel Marinir NRP 10416/P
3. Jabatan & Kesatuan : Paban II/Jemen Srenum TNI
4. Tempat & Tanggal Lahir : Nganjuk, 15 Februari 1970
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jln. Wibawa I E 3 no. 6 Cilandak
Jakarta Selatan

7. Pendidikan.

- a. Umum : 1) SD Tahun 1983
2) SMP Tahun 1986
3) SMA Tahun 1989
- b. Militer : 1) AAL Tahun 1992
2) Diklapa I Tahun 1995
3) Diklapa II Tahun 2001
4) Dikreg Seskoal Tahun 2008
5) Dikreg Sesko TNI Tahun 2016

8. Riwayat Jabatan.

- a. 1992 AAL/DENMA /DPB/DIKPASIS
- b. 1993 K O R M A R/BRIGIF-2/YONIF-4/KI E/TON 3/DAN
- c. 1994 K O R M A R/BRIGIF-2/KIMA/DPB/DIKLAPA I
- d. 1995 K O R M A R/BRIGIF-2/YONIF-4/KI-D/TON BAN/DAN
- e. 1995 MABESAL/MABESAL/SPRI KASAL/ADC
- f. 1996 KORMAR/BRIGIF-2/YONIF-4/KI-D/WADAN
- g. 1996 KORMAR/BRIGIF-2/YONIF-4/KIMA/WADAN
- h. 1997 KORMAR/BRIGIF-2/YONIF-4/KI E/DAN

- i. 1999 KORMAR/BRIGIF-2/YONIF-4/SI 2/PA/WAKIL
- j. 2000 KORMAR/SETUM/BAG SUS/KA
- k. 2001 KORMAR/DENMAKO/DPB DIKLAPA II
- l. 2001 KORMAR/LANMAR JKT/KIMA/DAN
- m. 2002 KORMAR/SOPS/BAN TIK/BANDYA INF/PA
- n. 2003 KORMAR/BRIGMAR BS/YONIF MAR-2/PASI-2
- o. 2004 KORMAR/PASMAR-2/BRIGIF-3/YONIF-8/WADAN
- p. 2005 AAL/FLOTILA/RON I/DAN
- q. 2006 KORMAR/KOLATMAR/PUSLATPUR ASEMBAGUS/WADAN
- r. 2006 KORMAR/KOLATMAR/PUSLATPUR ANTRALINA/WADAN
- s. 2007 KORMAR/SRENA/BAN BINSIS/BANDYA BINMET/PA
- t. 2008 KORMAR/DENMAKO/DPB DIKSESKOAL
- u. 2008 KORMAR/PASMAR-1/YON MARHANLAN KPG/DAN
- v. 2009 KORMAR/PASMAR-1/YONIF-5/DAN
- w. 2010 KORMAR/SOPS/BAN OPSLAT/PA
- x. 2012 KORMAR/SRENA/BAN RENUM/PA
- y. 2013 KORMAR/PASMAR I SBY/SRENA/AS
- z. 2014 KOARMABAR/LANTAMAL I BLW/LANAL
LHOKSEUMAWE/DAN
- aa. 2015 SESKOAL/KOORDOS/DOSEN SBS SISBINLAT
- bb. 2016 KOARMABAR/SAHLI PANG/SAHLI PANG "A" WILNAS
- cc. 2017 MABES TNI/SESKO TNI/DOSEN
- dd. 2018 KODIKLATAL/PUSLATDIKSARMIL/DAN
- ee. 2020 KOARMADA III/LANTAMAL IX AMB/WADAN
- ff. 2020 MABES TNI/SRENUM TNI/BAN-II JEMEN/P

9. Daftar Keluarga.

- a. Nama Isteri : Emmy Purbasari
- b. Nama Anak :
 - 1) Hreeloita Dharma Shanti (P)
 - 2) Shania A'raafianti Rahma Devi (P)
 - 3) Muhammad Asyam A.L.B.P (P)
 - 4) Al-Zena L. Aisyah Farrin R (P)

10. Judul-judul Karya Tulis : **Pendekatan *Extraordinary* Pembinaan Kesadaran Bela Negara Guna Memantapkan Ketahanan Nasional.**

11. Lain-lain (Tanda Penghargaan) :

- a. BT. YUDHA DHARMA NARARYA
- b. BT. JALASENA NARARYA
- c. SL. GOM VII
- d. SL. KESETIAAN VIII
- e. SL. KESETIAAN XVI
- f. SL. KESETIAAN XXIV
- g. SL. DWIDYA SISTHA
- h. SL. DHARMA NUSA
- i. SL. WIRA KARYA
- j. SL. WIRA DHARMA (PERBATASAN)
- k. SL. WIRA NUSA
- l. SL. DHARMA NUSA
- m. MEDAL OF HONOUR AMM (JSC)



Jakarta, 10 Agustus 2022
Penulis



Agus Dwi Laksana Putra
Kolonel Mar. NRP. 10416/P